



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

HUBUNGAN TINGKAT PENDIDIKAN, PEKERJAAN, DAN PENGHASILAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

SKRIPSI



ZAHRATUL HASANAH
0810531013

**PROGRAM STUDI S1 JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2012**

PERNYATAAN DOSEN PEMBIMBING

Dengan ini saya menyatakan bahwa, hasil pemeriksaan ulang saya mengenai tata cara penulisan skripsi mahasiswa bimbingan saya yang bernama **ZAH RATUL HASANAH (Bp 0810531013)** dengan judul **HUBUNGAN TINGKAT PENDIDIKAN, PEKERJAAN, DAN PENGHASILAN TERHADAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK**, sepanjang pengetahuan saya, skripsi ini telah ditulis sesuai dengan ketentuan/pedoman penulisan yang berlaku atau telah bebas dari unsur/tindakan plagiarisme, hal ini juga sesuai dengan pernyataan keaslian skripsi dari mahasiswa yang bersangkutan.

Padang, Agustus 2012
Dosen Pembimbing



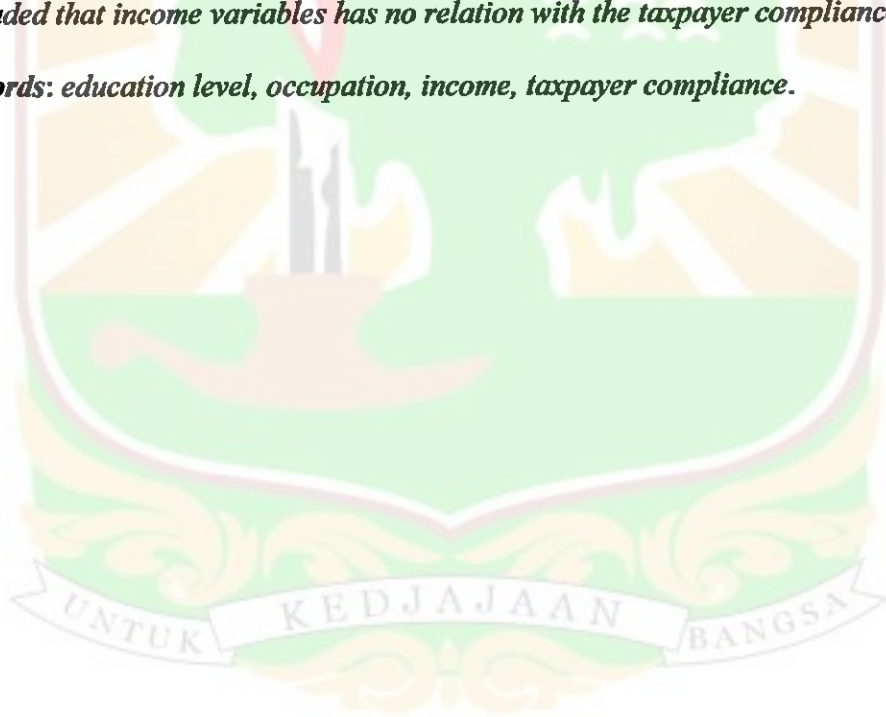
(Drs. H. Rinaldi Munaf, MM, Ak, CPA)

NIP: 196205041988111001

ABSTRACT

Education level, occupation, and income has a relationship with the taxpayer compliance. therefore, this study aims to determine how much the relationship between the independent variable namely the level of education (x1), work (x2) and income (x3) with the dependent variable (y) the taxpayer compliance. This research was conducted by the survey of domestic individual taxpayers, especially entrepreneurs who have been registered in Bukittinggi tax office by deploying the questionnaire prepared for the investigational taxpayer. Discussion about the relationship educational level, occupation, and income to the taxpayer compliance using correlation analysis. for the level of education has a value of F 7.005, significance 0.003. for occupation has a value of F 7.061 and significance 0,012. from these results it can be concluded that both these variables have a relationship with the taxpayer compliance. Strong relations between the two variables H1 and H2 received. For the variable income the value of F 2.210, significance 0.126. can be concluded that income variables has no relation with the taxpayer compliance.

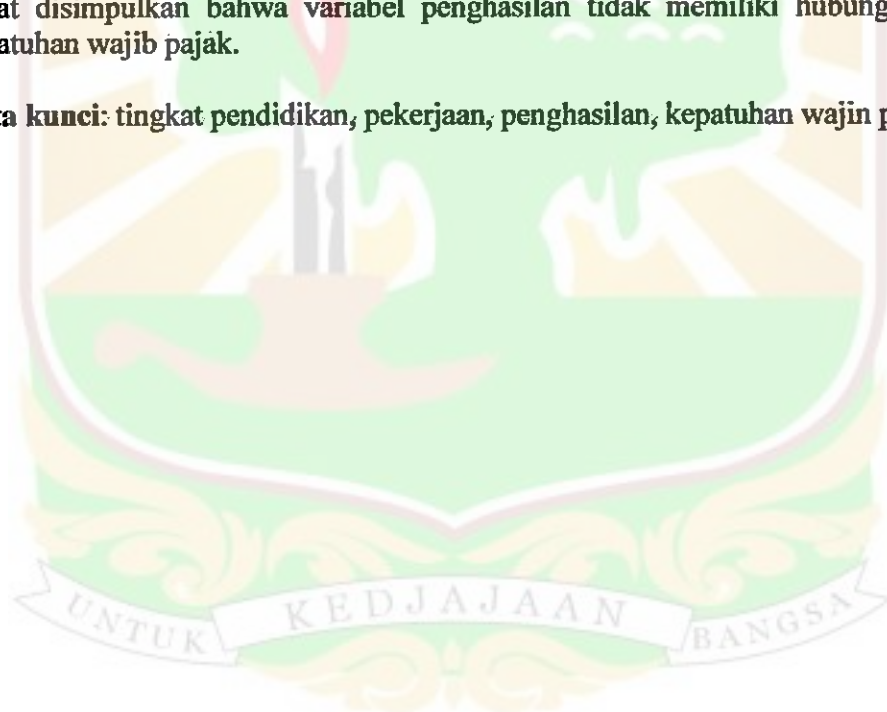
Keywords: *education level, occupation, income, taxpayer compliance.*



ABSTRAK

Tingkat pendidikan, pekerjaan dan penghasilan memiliki hubungan dengan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara variabel independen yaitu tingkat pendidikan (X_1), pekerjaan (X_2), penghasilan (X_3), dengan variabel (Y) yaitu kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dilakukan dengan metode survei terhadap wajib pajak dalam negeri khususnya pengusaha yang telah terdaftar di KPP Bukittinggi dengan cara menyebarkan kuesioner yang disiapkan untuk wajib pajak yang diteliti. Pembahasan mengenai hubungan tingkat pendidikan, pekerjaan, penghasilan dengan kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan analisa korelasi. Untuk tingkat pendidikan memiliki nilai F 7,005 signifikansinya 0,003. Untuk pekerjaan memiliki nilai F 7,061 dan signifikansinya 0,012. Dari hasil ini dapat kita simpulkan bahwa kedua variabel ini memiliki hubungan dengan kepatuhan wajib pajak, hubungan kedua variabel kuat H_1 dan H_2 diterima. Untuk variabel penghasilan nilai F 2,210 signifikansinya 0,126 dapat disimpulkan bahwa variabel penghasilan tidak memiliki hubungan dengan kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: tingkat pendidikan, pekerjaan, penghasilan, kepatuhan wajib pajak



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, karunia dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Allah Maha melihat Allah Maha mendengar keluh kesah suka duka penulisan skripsi ini hanya kepada Mu lah hamba mengadu dan Syukur yang tak henti-hentinya hamba ucapkan kepada Mu Ya Allah atas segala petunjuk Mu. Shalawat dan salam tidak lupa penulis sampaikan kepada our beloved prophet Muhammad SAW.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan, saran, bimbingan dan dorongan semangat dari banyak pihak, dan oleh sebab itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak berikut ini :

1. Orang tua penulis. Mama tercinta (Dra. Nelly Jaswita) yang selalu dan tidak pernah berhenti memberikan kasih sayang, perhatian, semangat, bantuan, yang tak terhingga untuk ananda, Mama yang mampu membuat ananda semangat menulis skripsi walau dalam keadaan terjatuh dan tertekan, mama yang mampu membuat ku tegar melawan badai dan terik matahari yang menyengat untuk tetap terus berusaha menemui pembimbing, ya! Mama lah alasan terbesar ku untuk sukses, terima kasih untuk Papa (Zoni Waker, B.sc (Alm)) yang telah mendoakan ananda mu ini dari jauh, ananda berjanji akan membuat papa bangga dan tersenyum di atas sana. Untuk adik ku tersayang Anisa Ulfa makasi ya sayang doa dan keusilannya, insyaallah kakak akan

menepati janji kak, yang penting ica belajar yang rajin dulu ya biar bisa jadi dokter.

2. Keluarga dan saudara-saudara penulis Bunda, Uncu alam, Angah tersayang, Ibu, Uncu ujang, Nenek Canti, tante marnis, nte wang, mandut, sepupu-sepupu ku si abang, kak gina, kak geni, kujak, kolorin, kolodil, dan semua keluarga besar yang tidak bisa di sebutkan satu persatu.
3. Bapak Prof. Tafdil Husni, SE., MBA, Ph.D, sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
4. Bapak Yuskar selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas
5. Bapak Fauzan selaku kepala prodi yang telah membantu saya dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Firdaus selaku pembimbing akademik penulis.
7. Bapak Drs. H. Rinaldi Munaf, MM, Ak, CPA selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah berkenan meluangkan waktu, memberikan masukan dan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini. ☺
8. Dosen penelaah skripsi Ibu Dr. Yulia Hendri Yeni, SE, Mt, Ak.
9. Seluruh dosen dan staf pengajar yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan beserta karyawan-karyawati Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Andalas
10. Staff biro Akuntansi, mama Loli tersayang, semoga mama tetap slalu bisa jadi mama bersama buat kami, ni Eva yang baik hati, dan da Ari yang slalu semangat. Terima kasih atas bantuan dan kemudahan akses yang diberikan selama ini.

11. Terima kasih buat sahabat ku repoy yang slalu membantu ku dalam keadaan apapun, sabar menghadapi semua keluhan dan permintaan ku, slalu memberikan ilmu dan membukakan pintu kamar nya saat aku merengek regek minta bantuan, akhir nya mimpi kita wisuda bareng tercapai juga, semoga di masa depan kita juga akan slalu bersama, amiin ya allah.
12. Para sahabat Kosan Keroppi yang slalu ada buat ku, mulai dari teman tidur yang sabar dan baik hati Kuyak, temen temen gokil ega, imel, dan jane yang slalu punya sesuatu yang baru, kakak kosan kak winda, kak tid, kak coki, adek kosan riva, eci, dan ditia.
13. Keluarga Marhu, Mama, Papa, kak Rita, tante Ef, bang Ritter, indut, Utut dan spesial buat Mama Rina terima kasih atas doa dan bantuannya dalam skripsi ra, dan yang paling spesial untuk yang punya keluarga ini Marhamah sahabat yang akan menjadi besan ku (ngayal), tidak lupa buat bang Choc, dan bang Bayu.
14. My Wali Songo. Wanita wanita hebat ku Yeyeeeee.. finally.. Revi, Puput, Makwo, Ziyah, Ipit, Fienta, Tika, Echa, and dewan suro terhormat, Resa yang selalu ada selama ini dalam suka dan duka. Organisasi kita memang kuat :D, ra berharap persahabatan ini tak akan pernah usai sampai akhir masa Amiin.
15. Para pria pria basi, Alvin, Taufik, Anes, Vicky, Okta, Pewe, Gorby, Cipaik, dan Doli atas segala keceriaan, kebersamaan, dan kekonyolan selama ini.
16. Salah satu organisasi terbesar lainnya geng syahrini Mike, Monic, Kodong, Shintya, Dedek, Amak, Ramon, Kak ros yang hiasi hari hari ku.
17. Keluarga besar Akuntansi dan 44 pejuang AOC 23 yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu. Angkatan hujan 08, KITA Selamanya.

18. Teman sepembimbingan Okta terima kasih telah menemani ra awal bimbingan, dan spesial buat Vicky yang telah setia menemani ra setiap bimbingan sampai selesai, setia menemani ra saat galau, slalu ada buat ra, termasuk saat ra pengen minum susu di “freak milk”, semoga persahabatan kita akan selama nya ya bab. Kata2 bodoh yang muncul saat bimbingan ini akan slalu ra ingat “3 rahasia kecantikan Babi, ekor di blow, kuku di kutex dan idung yang di pres”. Semangat untuk Okta dan Vicky kalian pasti bisa seminar bareng. Terima kasih juga untuk Deri, Webi dan Dewi.
19. Terima kasih untuk Bg Monda dan Bg Dewa atas ilmunya, kak keli yg slalu semangatin ra untuk bimbingan, nurul, susan, uty, tarikon seli, butet, sinta dan semua keluarga besar akuntansi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.☺
20. Semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa penulis sebutkan satu, persatu.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu, kritik dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini sangat penulis harapkan dan akan diterima dengan senang hati. Atas perhatian dan dukungannya penulis ucapkan terima kasih.

Padang, Agustus 2012

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR PUSTAKA	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Perumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Sistematika Pembahasan	6
 BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Perpajakan	8
2.1.1 Definisi Perpajakan	8
2.1.2 Fungsi Dan Karakteristik Pajak	11
2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak	14
2.2 Wajib pajak dan Perilakunya	16
2.2.1 Definisi Wajib pajak	16
2.2.2 Pengelompokan Wajib Pajak	17
2.2.3 Perilaku Wajib Pajak	18
2.3 Tingkat Sosial Ekonomi	21
2.3.1 Definisi Tingkat Sosial Ekonomi	21
2.3.2 Pendidikan	22
2.3.3 Pekerjaan	23

2.3.4	Penghasilan	24
2.4	Kepatuhan Wajib Pajak (<i>compliance</i>)	26
2.5	Tingkat Pendidikan, Pekerjaan, dan Penghasilan Berpengaruh Dengan Kepatuhan Wajib pajak	29
2.6	Review Penelitian Terdahulu	30
2.7	Hipotesis Penelitian	32

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1	Objek Penelitian	33
3.2	Subjek penelitian	33
3.3	Populasi dan Sampel	33
3.4	Identifikasi dan Pengukuran Variabel	34
3.5	Metode Pengumpulan Data	39
3.5.1	Teknik Pengumpulan Data	39
3.5.2	Instrumen Penelitian	39
3.5.3	Teknik Analisis Data	41

BAB IV ANALISIS dan PEMBAHASAN

4.1	Deskripsi Data	43
4.1.1	Cara Pengumpulan Data	43
4.1.2	Waktu, Tempat Penelitian, dan Jumlah Responden	43
4.2	Uji Validitas dan Reabilitas Instrumen	44
4.3	Pembahasan dan Interpretasi Hasil Penelitian	46
4.3.1	Deskripsi Variabel	46
4.3.2	Pengolahan Data dan Analisis Data	52
4.3.2.1	Uji Validitas dan Reabilitas	52
4.3.2.1	Pengujian Hipotesis	52
4.4	Uraian dan Analisis	54

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1	Kesimpulan	55
5.2	Implikasi dan Saran	58

5.2.1	Implikasi dan Saran Bagi Wajib pajak Pribadi	58
5.2.2	Implikasi dan Saran Bagi Perbaikan Institusi Perpajakan (Pemerintahan)	59
5.3	Keterbatasan Penelitian	60
LAMPIRAN		63



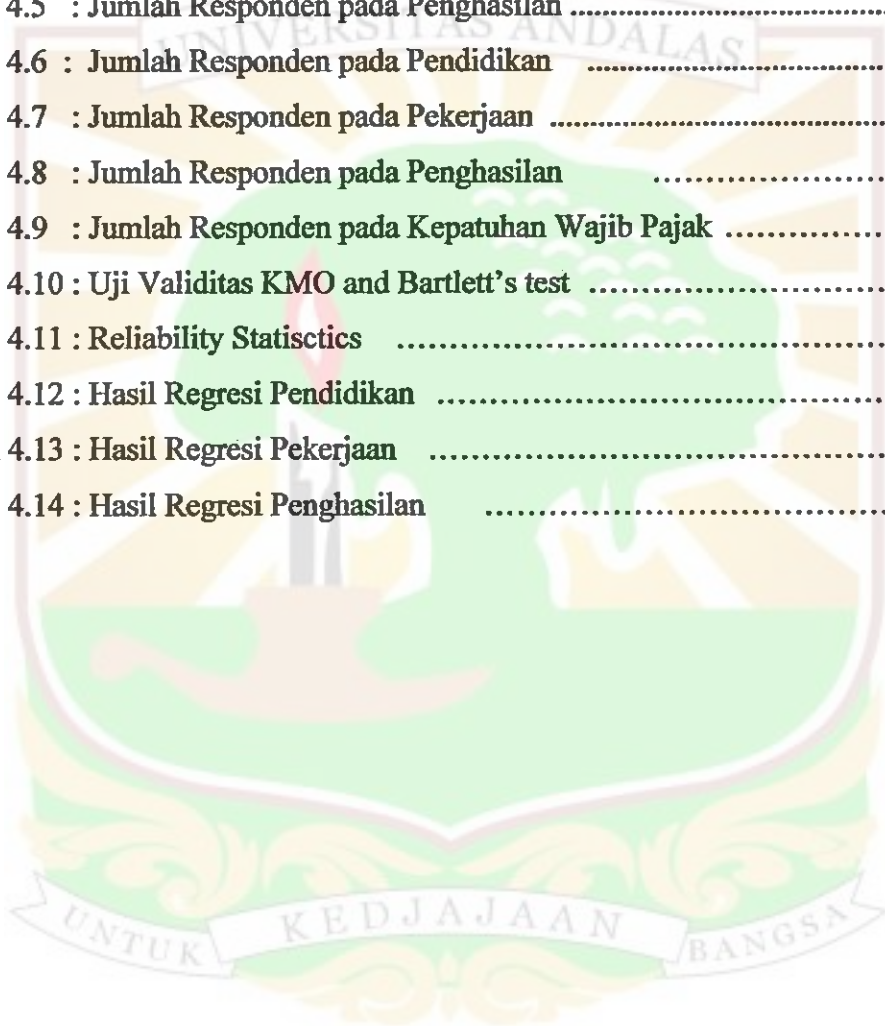
DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 : Hubungan Variabel Indepebden (X) dan Variabel
Dependen (Y) 38



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Intrumen Penelitian	40
Tabel 4.1 : Uji Validitas KMO and Bartlett's test.....	45
Tabel 4.2 : Reliability Statistics	46
Tabel 4.3 : Jumlah Responden pada Tingkat Pendidikan	47
Tabel 4.4 : Jumlah Responden pada Pekerjaan	47
Tabel 4.5 : Jumlah Responden pada Penghasilan	48
Tabel 4.6 : Jumlah Responden pada Pendidikan	48
Tabel 4.7 : Jumlah Responden pada Pekerjaan	49
Tabel 4.8 : Jumlah Responden pada Penghasilan	49
Tabel 4.9 : Jumlah Responden pada Kepatuhan Wajib Pajak	50
Tabel 4.10 : Uji Validitas KMO and Bartlett's test	51
Tabel 4.11 : Reliability Statistics	52
Tabel 4.12 : Hasil Regresi Pendidikan	52
Tabel 4.13 : Hasil Regresi Pekerjaan	53
Tabel 4.14 : Hasil Regresi Penghasilan	53



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan	63
Lampiran 2 Output SPSS 15.0	65
Lampiran 3 Data Hasil Kuesioner Responden	72



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung terus menerus dan kesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu adanya perhatian khusus mengenai pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan cara menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri, salah satunya adalah pajak. Oleh karena itu sektor pajak merupakan sumber penerimaan dana negara yang amat penting dalam rangka menuju pembiayaan pembangunan yang mandiri tidak tergantung pada pinjaman ataupun bantuan yang berasal dari luar negeri dan juga untuk penyelenggaraan pemerintah yang adil dan makmur sehingga tercapainya tujuan bersama.

Untuk mencapai semua itu pemerintah serius dalam menangani masalah pajak dengan memperbaiki sistem perpajakan secara terus menerus atau yang lebih dikenal dengan istilah reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan khususnya pajak penghasilan yaitu UU No. 7 Tahun 1983 yang disempurnakan menjadi UU No. 7 Tahun 1991, UU No. 10 Tahun 1994, UU No. 17 Tahun 2000 dan yang terbaru adalah UU PPh No.36 Tahun 2008. Dari penyempurnaan undang-undang perpajakan tersebut pemerintah tetap mempertahankan prinsip-prinsip perpajakan yaitu keadilan, kemudahan dan produktivitas penerimaan serta tetap memakai sistem *self assessment*. Walaupun peraturan-peraturan perundang-

undangan perpajakan telah disempurnakan supaya memudahkan wajib pajak tetapi pemerintah tetap mengalami berbagai kendala. Kendala tersebut berasal dari masyarakat (wajib pajak) maupun dari pihak otoritas pajak. Kendala-kendala tersebut muncul akibat kurangnya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak. Kendala tersebut antara lain yaitu penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan pemerintah oleh sebagian wajib pajak untuk menyalahgunakan pembayaran perpajakan.

Tax Ratio atau secara sederhana dapat digambarkan sebagai total penerimaan pajak dari rakyat dibandingkan dengan nilai transaksi ekonomi yang terjadi disuatu negara.

Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak pada prinsipnya ditempuh melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Dari sisi ekstensifikasi pajak, pemerintah melakukan perubahan ketentuan peraturan perpajakan untuk memperluas cakupan subjek dan objek pajak.

Peran serta wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Namun, dalam kenyataannya masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya.

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. Dengan demikian pengkajian terhadap faktor-faktor yang dapat menghubungkan kepatuhan wajib pajak sangat perlu diperhatikan. Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, di dalam sistem *self assessment* yang berlaku sekarang ini mensyaratkan agar pemungutan pajak dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan yang merupakan wujud dari

law enforcement untuk meningkatkan kepatuhan yang dapat menimbulkan aspek psikologis bagi Wajib pajak.

Richard M. Bird dan Milka Casanegara de Jantscher dalam Rosita (2006) menyatakan bahwa beberapa besarnya jurang kepatuhan (*tax gap*), yaitu selisih antara penerimaan yang sesungguhnya dengan pajak potensial dan tingkat kepatuhan dari masing-masing sektor perpajakan merupakan pengukuran yang lebih akurat atas efektifitas administrasi perpajakan.

Penyebab *tax gap* sangat terlihat pada lemahnya administrasi perpajakan. Keberhasilan pemungutan pajak hanyalah merupakan akibat semakin sempitnya *tax gap*. Upaya mengurangi kesenjangan dilakukan melalui penyempurnaan sistem administrasi perpajakan. Rendahnya *tax ratio* menunjukkan terdapatnya kesenjangan yang tajam dimana hal ini terkait erat dengan administrasi perpajakan.

Banyak faktor yang berhubungan terhadap kepatuhan wajib pajak, diantaranya yaitu tingkat sosial ekonomi (Pendidikan, Jenis Pekerjaan, Penghasilan). Tingkat sosial ekonomi biasa dikenal dengan sebutan status sosial ekonomi. Status sosial yang memiliki hubungan dengan kepatuhan wajib pajak cukup banyak salah satunya adalah hubungan tingkat pendidikan wajib pajak. Jika seorang wajib pajak memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dan memiliki wawasan yang terbuka akan pajak ini akan berhubungan kepada kepatuhan wajib pajak (Rosita 2006).

Wajib pajak secara naluriah menyembunyikan informasi tentang perilaku ketidakpatuhan mereka. Kondisi ini tentu saja menyulitkan riset empiris yang bertujuan menguji kepatuhan wajib pajak. Boylan dan Sprinkle (2001) dalam

Rosita (2006) telah memberikan bukti penelitian mengenai keterkaitan antara kepatuhan wajib pajak dengan jenis penghasilan yang diterima (faktor ekonomi). Hasil dari penelitian Boylan dan Sprinkle (2001) dalam Rosita (2006) menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak meningkat ditunjukkan dengan peningkatan *reported income* ketika penghasilan yang mereka terima juga meningkat.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti mencoba melakukan pengujian terhadap tingkat sosial ekonomi dengan indikator pengukuran tingkat pendidikan, pekerjaan dan penghasilan wajib pajak dalam kaitannya terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu penulis mencoba melakukan penelitian dengan judul “Hubungan Tingkat Pendidikan, Pekerjaan dan Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Bukittinggi”.

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: “Apakah tingkat pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan memiliki hubungan dengan kepatuhan wajib pajak?”.

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai ada atau tidaknya hubungan tingkat pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi pemerintah

Hasil yang diperoleh nantinya dapat digunakan sebagai salah satu masukan yang patut dipertimbangkan dalam rangka melakukan ekstensifikasi objek pajak serta reformasi administrasi perpajakan serta mengetahui perilaku-perilaku wajib pajak di Indonesia serta faktor-faktor yang memhubungannya.

2. Bagi wajib pajak

Membuka wawasan berfikir wajib pajak akan pentingnya meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

3. Bagi penulis

Untuk meningkatkan wawasan tentang perpajakan sebagai profesional dan akademis serta pembelajaran diri menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban Perpajakan.

4. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan

Memberikan pemikiran bagi ilmu akademis, khususnya dalam bidang perpajakan, baik untuk kebijakan perpajakan maupun kebijakan bisnis dan dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi penelitian-penelitian dimasa akan datang.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi ini dibagi atas lima bab, masing-masing bab terbagi atas sub bab sesuai dengan kebutuhan pembahasan. Secara garis besarnya, masing-masing bab akan membahas hal berikut:

BAB I, Menjelaskan latar belakang pemilihan topik, penjelasan secara umum mengenai masalah yang dihadapi wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, tujuan dan manfaat serta penjelasan statistika penulisan.

BAB II, Memberikan penjelasan umum mengenai landasan teori-teori dalam perpajakan dan tingkat sosial ekonomi serta hubungannya dengan kepatuhan wajib pajak.

BAB IV, Menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan beserta langkah-langkah yang diambil seperti metode pengumpulan data, metode analisis data dan beberapa keterbatasan yang dihadapi. Menjelaskan lokasi penelitian yang dilakukan dan besarnya populasi penelitian secara umum, penjelasan singkat mengenai populasi yang diambil dan alasan pemilihan jumlah populasi yang diambil sebagai sampel penelitian.

BAB IV, Menjelaskan hasil studi yang dilakukan hasil kuesioner yang dikembalikan oleh para responden setelah diolah dengan menggunakan metode analisis data yang ditetapkan.

BAB V, Merupakan kesimpulan dari penelitian yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat atas hasil

penelitian yang telah dilakukan untuk menghasilkan saran guna
perbaikan institusi dimasa selanjutnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Perpajakan

2.1.1 Definisi Perpajakan

Pengertian Pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU No.6 tahun 1983 tentang Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian pajak menurut Sumitro dalam Mardiasmo (2006) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa imbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (h1).

Pengertian pajak menurut Andriani dalam Waluyo (2006) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki beberapa unsur berikut berupa iuran dari rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang

secara langsung dapat ditunjuk, digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, dan dapat dipaksakan.

Sebagaimana telah diketahui kriteria yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu fungsi penerimaan (*budgeter*) dan fungsi mengatur (*regulerend*).

Dari definisi diatas, dapat pula dilihat bahwa pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaanya
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pembayaran iuran dari rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak adalah pemerintah dari wajib pajak berupa uang.
4. Tanpa balas jasa dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk, dalam arti bahwa balas jasa yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan besarnya jumlah pajak yang dibayarkan.
5. Dapat dipaksa, yang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang berwenag, yaitu pemerintah.
6. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat luas.
7. Pajak mempunyai tujuan yang *nonbudgeter*, yaitu untuk mengatur.

8. Digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang bersifat umum, dalam arti bahwa pengeluaran-pengeluaran pemerintah digunakan untuk membiayai seluruh aktivitas, baik rutin maupun pembangunan, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.
9. Pajak dipungut disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang.

Keadaan

- a. Adanya bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh seseorang yang menyebabkan dipungutnya Pajak Bumi dan Bangunan kepada seseorang tersebut.
- b. Adanya penghasilan akan dikenakan Pajak Penghasilan.
- c. Adanya kendaraan bermotor akan dikenakan Pajak atas kendaraan Bermotor.

Perbuatan-perbuatan

- a. Adanya penyerahan barang atau jasa dari pabrik atau pengusaha jasa dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atas barang dan jasa.
- b. Ada perbuatan penyerahan uang yang diakui dengan dibuatnya tanda "penerimaan uang" dikenakan Bea Materai.
- c. Adanya pemasukan barang ke daerah pabean dikenakan Bea Masuk.

Peristiwa

Peristiwa meninggalnya pewaris mengakibatkan warisan yang belum dibagi yang mendatangkan penghasilan dikenakan Pajak Penghasilan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pajak adalah suatu kewajiban dari rakyat untuk menyerahkan sebagian dari harta kekayaannya ke kas negara. Sesuai dengan keadaan dan kedudukan tertentu menurut peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, yang dapat dipaksakan, tanpa adanya jasa timbal balik dari pemerintah (kontraprestasi) dan digunakan untuk kesejahteraan umum.

2.1.2 Fungsi dan Karakteristik Pajak

Pajak merupakan salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan yang merupakan sarana peran setiap anggota masyarakat dalam pembiayaan Negara. Pajak mempunyai 2 fungsi, yaitu:

1. Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluarannya. Contoh, dimasukkan pajak dalam APBN sebagai penerimaan pajak dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (*regulerand*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan keuangan. Contoh, dikenakannya pajak yang tinggi terhadap minuman keras, sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan (Abut 2006).

Sebagai fungsi budgetair, pajak merupakan sumber penerimaan negara yang dominan karena persentase penerimaan dari sektor ini cukup besar dibandingkan dengan penerimaan negara dari sektor-sektor lainnya.

Sebagai fungsi mengatur (*regulerand*), pajak merupakan alat untuk mengurangi kesenjangan sosial dan melaksanakan kebijakan pemerintah, karena pajak merupakan semacam pembebasan secara tidak langsung atas barang publik serta eksternalitas, sehingga mengarah pada pemerataan dalam masyarakat.

Adapun karakteristik kualitatif dari pemungutan pajak yang baik adalah:

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakin mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing wajib pajak. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat-syarat)

di Indonesia pajak di atur dengan undang-undang perpajakan.

3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya yang akan timbul dari pemungutan pajak dapat ditekan sehingga lebih rendah dari pajak yang akan dipungut.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Pajak sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan yang merupakan sarana peran serta setiap anggota masyarakat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Dengan demikian DJP harus selalu berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak seiring dengan meningkatnya kebutuhan dana pembangunan. Peningkatan penerimaan tersebut dapat dilakukan melalui ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pemungutan pajak.

Sebagai suatu unit organisasi yang ditunjukkan oleh pemerintah untuk menangani masalah pemungutan pajak, DJP perlu melakukan pelayanan, penyuluhan dan pengawasan/pemeriksaan terhadap para wajib pajak. Dalam pelaksanaannya DJP akan membuat kebijakan yang seharusnya tidak bertentangan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku serta peraturan pelaksanaannya, sehingga wajib pajak dapat memperoleh hak-haknya dan dapat melaksanakan kewajibannya dengan mudah dan sederhana.



2.1.3. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem- sistem pemungutan pajak yaitu:

- a. *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak

Ciri-cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
 2. Wajib pajak bersifat pasif
 3. Untang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus
- b. *Self Assessment System*, terbagi atas dua yaitu semi self assessment system dan full self assessment system.

Semi self assessment system adalah sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib pajak berada pada 2 pihak, yaitu Wajib pajak dan fiskus.

Dengan sistem ini maka, pada awal tahun wajib pajak menentukan atau menaksir sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang untuk tahun berjalan. Berdasarkan taksiran tersebut wajib pajak membayar pajak dalam bentuk angsuran. Pada akhir tahun, pajak yang sesungguhnya terutang ditetapkan oleh fiskus melalui Surat Ketetapan Pajak.

Ciri-cirinya:

Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang berada pada dua pihak, yaitu wajib pajak dan Fiskus.

Full Self Assessment System atau sering disebut dengan ***Self Assessment System*** saja adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang berada pada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang.

Ciri-cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri,
 2. Wajib pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang,
 3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
- c. ***With Holding System*** adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan Wajib pajak) untuk menentukan besarnya jumlah pajak terutang oleh Wajib pajak

Ciri-cirinya:

Wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak ketiga, selain fiskus dan wajib pajak.

Mulai tahun 1984 sampai dengan sekarang Indonesia menggunakan full assessment system. Namun demikian, didalam prakteknya tidak seluruh jenis pajak yang dipungut di Indonesia murni menggunakan full assessment sistem. Misalnya untuk Pajak Bumi dan Bangunan yang sampai saat ini masih menggunakan Official Assessment System.

2.2 Wajib pajak dan Perilakunya

2.2.1. Definisi Wajib pajak

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut atau memotong pajak tertentu.

Subjek pajak meliputi perseorangan, badan, dan lembaga lain untuk menggantikan yang berhak, sebagai pihak atau unit dimana subjek pajak yang timbul dapat diasosiasikan atau dianggap melekat. Selain itu subjek pajak juga meliputi perusahaan perseorangan dan warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan sedang wajib pajak adalah orang atau badan yang menurut Undang-Undang Pajak diwajibkan untuk melakukan perhitungan, pemungutan atau pemotongan, pembayaran, dan pelaporan perpajakan atau pihak yang harus melaksanakan kewajiban perpajakan tidak ada lain kecuali hanya perseorangan dan/atau badan (hukum).

Oleh karena itu dalam penelitian ini pajak yang akan dibahas merupakan pajak penghasilan, maka wajib pajak yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu orang pribadi yang dikenai pajak atas penghasilannya, dimana seseorang dapat dikatakan sebagai wajib pajak penghasilan apabila ia telah memperoleh atau menerima penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Penerapan PTKP ditentukan oleh keadaan pada awal tahun atau awal bagian tahun pajak, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Rp 15.840.000,- (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk wajib pajak orang pribadi

- Rp 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk wajib pajak yang kawin.
- Rp 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3(tiga) orang setiap keluarga

2.2.2 Pengelompokan Wajib pajak

Secara umum Wajib pajak dapat dibedakan atas dua, yaitu:

1. Wajib Pajak Pribadi

Adalah orang pribadi yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan.

2. Wajib Pajak Badan

Adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usah maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya.

BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi Politik atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Usaha lainnya.

Berdasarkan konsep Fiskal, wajib pajak juga dibedakan ke dalam 2 (dua) kategori yaitu wajib Bayar dan wajib Pungut. Termasuk dalam kategori entitas sebagai wajib Bayar adalah meliputi semua orang atau badan yang menurut Undang-Undang Perpajakan diwajibkan untuk secara periodik atau pada saat yang telah ditetapkan melaksanakan pencatatan, perhitungan, pembayaran dan

pelaporan pajak yang terutang sebagai akibat dari timbulnya objek pajak yang melekat pada diri subjek pajak atau wajib pajak. Sedang wajib pajak pungut meliputi setiap orang pribadi dan badan yang menurut undang-undang perpajakan diwajibkan untuk menghitung, memungut atau memotong pajak dari pihak lain, menyetorkan hasilnya, dan melaporkan (kepada pemerintah), untuk dan atas nama pihak lain (terpungut) pada saat yang telah ditetapkan (Abimanyu 2004).

2.2.3 Perilaku Wajib pajak

Struktur sosial sangat dihubungkan oleh pola perilaku manusia (individu) hasil proses belajar (pengalaman) yang melatar belakangi karakteristik individu lebih lanjut menimbulkan sikap individu terhadap rangsangan lingkungan ini menjadi dasar (titik tolak) dalam menentukan alternatif tindakan dan pemeliharaan tindakan. Apabila sikap individu dimanifestasikan ke tindakan dan pemeliharaan tindakan (*action*) yang dapat diamati, maka tindakan tersebut menjadi cermin perilakunya. Perilaku manusia adalah aspek veribel dari realitas.

Sikap tak hanya satu tindakan atau jawaban-jawaban tertentu dari seseorang tetapi merupakan keseluruhan tindakan di mana satu sama lain saling berhubungan. Terbentuknya sikap akan dihubungkan oleh bermacam-macam faktor. Dalam hal ini lingkungan sosial dan kebudayaan memberikan hubungan yang besar terhadap masing-masing individu, sehingga lingkungan sosial dan kebudayaan yang berbeda akan menghasilkan tingkah laku atau sikap yang berbeda pula.

Secara individual sikap dapat dibedakan yaitu sebagai berikut:

1. Sikap positif, yaitu sikap yang menunjukkan atau memperlihatkan, menerima, mengikuti, menyetujui serta melaksanakan norma-norma.
2. Sikap negatif, yaitu sikap yang menunjukkan atau memperlihatkan penolakan atau tidak menyetujui terhadap norma-norma yang berlaku individu itu berbeda.

Dengan demikian sikap adalah konsep membantu kita memahami tingkah laku. Sedangkan ketaatan adalah merupakan manifestasi dari pada sikap seseorang dan adanya sikap ketaatan disini adalah merupakan realisasi dari pada UU No.6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu:

Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara karena itu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan bagi para warga yang merupakan sarana peran serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Mengingat betapa pentingnya peran masyarakat untuk membayar pajak dalam sertanya menanggung pembiayaan Negara, maka dituntut kesadaran Warga Negara untuk memenuhi kewajiban kenegaraan. Sebagai dampak dari sikap positif maka akan berarah kepada kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan, sedangkan dampak dari sikap negatif akan berarah pada sikap untuk tidak memenuhi kewajiban membayar pajak. Dalam hal demikian timbul perlawanan terhadap pajak.

Perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan menjadi perlawanan pasif dan perlawanan aktif (Waluyo,2007)

Perlawanan Pasif

Perlawanan Pasif adalah berupa keengganan masyarakat untuk membayar pajak. Keengganan tersebut dapat disebabkan antara lain oleh :

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat yang tidak atau kurang memahami dan mengerti mengapa mereka harus membayar pajak dan untuk apa hasil pemungutan pajak itu digunakan.
- b. Sistem dan aturan perpajakan yang (mungkin) sulit di pahami oleh masyarakat
- c. Sistem administrasi dan kontrol yang tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

Perlawanan Aktif

Perlawanan Aktif adalah meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung di tunjukkan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari membayar pajak. Bentuk perlawanan aktif :

- a. *Tax avoidance*, adalah usaha untuk menghindari atau meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-Undang. Misalnya, dengan memasukkan tunjangan pajak ke dalam penghasilan karyawan sehingga bagi perusahaan dapat dijadikan sebagai biaya untuk mengurangi penghasilan perusahaan. Alternatif ini akan meringankan beban pajak perusahaan dibanding kalau perusahaan memilih untuk menanggung beban pajak karyawan yang pengeluarannya tersebut tidak boleh dijadikan sebagai pengurang penghasilan bagi perusahaan.

- b. *Tax evasion*, adalah usaha untuk meringankan atau menghindari beban pajak dengan cara yang melanggar Undang-Undang. Misalnya, dengan memalsukan atau menghilangkan bukti-bukti transaksi yang terjadi dalam perusahaan (Mardiasmo 2003).

2.3 Tingkat Sosial Ekonomi

2.3.1 Definisi Tingkat Sosial Ekonomi

Yang dimaksud sosial ekonomi disini adalah status sosial, yaitu kedudukan didalam masyarakat atau kelompoknya, sering pula disebut posisi sosial. Tiap manusia yang hidup dalam masyarakat pasti mempunyai banyak status, misalnya disamping ia seorang laki-laki, ia juga seorang suami, anggota polisi, ketua RT dan sebagainya.

Status itu mempunyai dua aspek, yaitu aspek sosial dan aspek fungsional.

- a. Aspek sosial dimaksudkan bahwa status sosial itu mempunyai sifat herarkhis yang mengandung perbandingan tinggi rendahnya antara relatif terhadap status yang lain.
- b. Aspek fungsional dimaksudkan bahwa status sosial itu berkaitan dengan fungsi atau peranan sosialnya.

Status sosial adalah perbedaan masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Manifestasi dari gejala stratifikasi sosial adalah kelas-kelas tinggi dan rendah.

Status sosial ekonomi kerap kali disamakan dengan kelas sosial yang di perlihatkan oleh penghargaan seseorang karena prestasi tertentu. Kelas sosial dan

status sosial ditentukan dalam berbagai variabel yang bersifat kompleks dan sebagian menjadi penentu serta menjelaskan apa yang diinginkan orang.

Pada umumnya yang dijadikan dasar ukuran untuk menentukan tinggi rendahnya status sosial adalah:

1. Pendidikan
2. Jabatan atau pekerjaan
3. Kedudukan ekonomis
4. Politik, bagi negara yang menganut partai tunggal
5. Ilmiah, terutama bagi karangan sarjana
6. Ikatan keluarga, misalnya kakaknya jadi pejabat tinggi dan ia pun punya status yang tinggi pula (Heriyanto 2006).

2.3.2 Pendidikan

Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan; proses, cara, pembuatan mendidik (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001). Sedangkan menurut UU R.I No.2 Tahun 1989, Pasal 12 ayat (1), jenjang pendidikan itu meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Pendidikan adalah satu cara dimana individu meningkatkan modal manusianya. Semakin tinggi pendidikan seseorang, diharapkan stok modal manusianya semakin tinggi. Pendidikan dianggap memiliki peranan paling penting dalam menentukan kualitas manusia. Lewat pendidikan, manusia

dianggap akan memperoleh pengetahuan, dan dengan pengetahuannya manusia diharapkan dapat membangun keberadaan hidupnya dengan lebih baik.

Implikasinya, semakin tinggi pendidikan, hidup manusia akan semakin berkualitas. Dalam kaitannya dengan perekonomian secara umum (Nasional), semakin tinggi kualitas hidup suatu bangsa, semakin tinggi tingkat pertumbuhan dan kesejahteraan bangsa tersebut.

Manusia yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, yang diukur juga dengan lamanya waktu sekolah, akan memiliki pekerjaan dan upah yang lebih baik dibanding yang pendidikannya lebih rendah. Apabila upah mencerminkan produktifitas, maka semakin banyak orang memiliki pendidikan tinggi, semakin tinggi produktifitas dan hasilnya ekonomi nasional akan bertumbuh lebih tinggi.

2.3.3 Pekerjaan

Profesi atau pekerjaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan manusia sebagai sumber penghasilan atau mata pencariannya. Diferensiasi profesi merupakan merupakan pengelompokan masyarakat yang didasarkan pada jenis pekerjaan atau profesinya. Profesi biasanya berkaitan dengan suatu keterampilan khusus. Misalnya profesi guru memerlukan keterampilan khusus, seperti: pandai berbicara, suka membimbing, sabar, dsb.

Jenis pekerjaan utama dibedakan atas: (1) tenaga profesional, teknisi (2) Tenaga ketatalaksanaan/Manajer, (3) Tenaga administrasi, (4) Tenaga usaha penjualan, (5) Tenaga usaha jasa, (6) Petani dan nelayan, (7/8/9) Operator alat pengangkutan, tenaga kasar, tenaga yang langsung berhubungan dengan kegiatan produksi. Pengelompokan jenis pekerjaan ini secara ringkas dikenal sebagai white

collar (jenis pekerjaan kelompok 1s/d 5) blue collar (jenis pekerjaan kelompok (6/7/8/9). Pengelompokan seperti itu di Indonesia dapat ditambahkan satu kelompok lagi sebagai “grey collar” yang terdiri atas sebagian jenis pekerjaan kelompok 4 berupa pedagang kaki lima (PKL) dan sebagian sekelompok 5 berupa pembantu rumah tangga (PRT).

Untuk mempermudah penelitian maka peneliti mengelompokkan jenis pekerjaan ke dalam dua kategori, yaitu:

1. Pekerjaan professional, yaitu pekerjaan yang membutuhkan keahlian/skill khusus untuk menggeluti kegiatan didalamnya. Seperti: akuntan, arsitek.
2. Pekerjaan non professional, yaitu pekerjaan yang tidak perlu harus memiliki keahlian/skill khusus untuk menggeluti kegiatan didalamnya, seperti: pedagang.

2.3.4 Penghasilan

Menurut Pasal 4 ayat (1),(2) UU No.7 tahun 1991 penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak dari manapun asalnya (baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia) yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pengelompokan penghasilan berdasarkan aliran tambahan kemampuan ekonomis dibagi menjadi:

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas.
2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan.

3. Penghasilan dari modal, yang berupa harta bergerak maupun harta tak bergerak.
4. Penghasilan lain-lain, seperti hadiah, pembebasan utang, keuntungan selisih kurs, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva tetap dll.

Menurut David Richardo dalam Heriyanto (2006), bahwa tingkatan ekonomi keluarga dapat dibedakan menjadi tiga golongan ekonomi kuat, golongan ekonomi sedang, golongan ekonomi rendah.

Untuk menentukan kategori pendapatan tidak mutlak tergantung jenjang pendidikan maupun jenis pekerjaan, namun yang penting adalah besar kecilnya penghasilan rata-rata tiap bulan, karena banyak sekali orang yang mempunyai pendidikan tinggi namun berpenghasilan rendah. Penentuan tinggi rendahnya pendapatan itu memang agak sulit, karena masalah ini bersifat sangat relatif. Artinya pendapatan yang tinggi disuatu daerah tidak harus tinggi pula untuk daerah lain. Ketentuan kategori tingkatan ekonomi atau pendapatan.

Para ekonom mendefinikan penghasilan sebagai jumlah (barang dan jasa) yang dalam jangka waktu tertentu bisa dikonsumsi oleh suatu entitas, tanpa mengakibatkan berkurangnya modal. Penghasilan diukur berdasarkan kenaikan (atau penurunan) nilai kekayaan atau modal yang dimiliki oleh suatu entitas ditambah dengan nilai (harga pasar) dari barang atau jasa yang dikonsumsi dalam suatu periode.

Berdasarkan teori diatas, dan hubungan dengan penelitian ini maka modal/omzet dianggap menggambarkan penghasilan/pendapatan seseorang, untuk mengidentifikasi hubungannya terhadap kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

2.4 Kepatuhan Wajib pajak (*Compliance*)

Ketaatan/Kepatuhan merupakan perwujudan sikap manusia yang timbul karena adanya interaksi manusia dengan objek tertentu. Sikap tak hanya satu tindakan atau jawaban-jawaban tertentu dari seseorang tetapi merupakan keseluruhan tindakan dimana satu sama lain saling berhubungan. Terbentuknya sikap akan dihubungkan oleh bermacam-macam faktor. Dalam hal ini lingkungan sosial dan kebudayaan memberikan hubungan yang besar terhadap masing-masing individu, sehingga lingkungan sosial dan kebudayaan yang berbeda akan menghasilkan tingkah laku atau sikap yang berbeda pula.

Ketika berbicara tentang kepatuhan *compliance*, terlebih dahulu perlu diketahui apa-apa saja kategori *compliance*. *Compliance* bisa dikategorikan dalam 2 hal :

a. *Administrative Compliance*

Merupakan bentuk kepatuhan terhadap aturan-aturan administratif seperti pengajuan pembayaran yang tepat waktu.

b. *Technical Compliance*

Merupakan kepatuhan wajib pajak terhadap teknis pembayaran pajak, misalnya pajak dihitung sesuai dengan ketentuan teknis dari undang-undang perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. menggunakan teori psikologi dalam kepatuhan wajib pajak, yaitu rasa bersalah dan rasa malu, persepsi

wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan hubungan keputusan terhadap pelayanan pemerintah.

Hadi Purnomo (2005) menyatakan tiga strategi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui administrasi perpajakan, yaitu pertama dengan membuat program dan kegiatan yang diharapkan dapat menyadarkan dan meningkatkan kepatuhan sukarela, khususnya bagi wajib pajak yang relatif sudah patuh sehingga tingkat kepatuhannya dapat di pertahankan atau ditingkatkan, ketiga meningkatkan kepatuhan dengan program dan kegiatan yang dapat memerangi ketidakpatuhan *combatting non compliance*.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 tanggal 3 juni 2003, wajib pajak dapat ditetapkan sebagai wajib pajak patuh yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila memenuhi semua syarat sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2(dua) tahun terakhir.
- b. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
- c. SPT Masa yang terlambat itu disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pajak berikutnya;
- d. Tidak mempunyai tunggakan Pajak untuk semua jenis pajak:
 1. Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;

2. Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan SPT yang diterbitkan untuk 2(dua) masa pajak terakhir:
- e. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; dan
- f. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak memengaruhi laba rugi fiskal. Laporan audit harus:
 1. Disusun dalam bentuk panjang (long form report);
 2. Menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal.

Mengingat betapa pentingnya pajak bagi penyelenggaraan aktivitas negara maka tingkat kepatuhan yang tinggi dalam membayar pajak sangat diharapkan. Rendahnya tingkat kepatuhan membayar pajak akan membawa pajak akan membawa konsekuensi sebagai berikut:

1. Hilangnya potensi pendapatan
2. Membuat sistem perpajakan kurang prospektif
3. Membuat sistem perpajakan kurang dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan.

Semakin jelaslah bahwa kepatuhan wajib pajak adalah hal yang sangat urgent sekali karena akan membawa konsekuensi yang berat terhadap perekonomian bangsa, mengingat pajak merupakan sumber utama pembiayaan pemerintah dan pembangunan.

2.5. Tingkat Pendidikan, Pekerjaan, dan Penghasilan Berhubungan dengan Kepatuhan Wajib pajak

Berdasarkan uraian di atas ada beberapa variabel yang diduga berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan/pendapatan. Berikut akan diulas secara ringkas beberapa hubungan tiga variabel tersebut dengan kepatuhan wajib pajak.

Pertama, pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan (jenjang pendidikan yang ditempuh), maka pengetahuan seputar perpajakan baik yang dipelajari dilingkungan pendidikan maupun yang didengar dari pergaulan akan lebih pula. Yang menyebabkan wajib pajak lebih mengerti akan pentingnya membayar pajak dan sanksi apa yang didapat apabila tidak memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak. Sehingga berujung dengan meningkatnya kepatuhan sebagai wajib pajak.

Kedua, pekerjaan. Semakin profesional (skill, semi skill, non skill) pekerjaan seseorang, maka pola pikir dan pengetahuannya semakin maju, sehingga akan semakin mengerti pula akan pentingnya pajak dan dampak yang diakibatkan apabila melalaikan kewajiban perpajakannya, yang nantinya akan membawanya untuk menjadi wajib pajak patuh.

Ketiga, penghasilan. Semakin besar penghasilan seseorang, akan terlihat jelas dengan semakin meningkatnya keadaan ekonominya, apakah itu berupa perubahan gaya hidup maupun berupa barang-barang berharga dan mewah yang dimiliki. Yang kemudian timbul ketakutan akan dilakukan pemeriksaan pajak

terhadapnya apabila dia tidak melaporkan pajak sebenarnya terutang. Yang nantinya membawa wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak .

2.6 Review Penelitian Terdahulu

Mustikasari (2007) telah melakukan *review literature* yang menyeluruh terhadap penelitian yang berkaitan dengan *tax compliance*. Mereka kemudian mengidentifikasi 14 variabel yang paling sering menjadi fokus penelitian dan ditemukan memhubungani perilaku kepatuhan pembayar pajak yaitu umur, jenis kelamin, pendidikan, tingkat pendapatan, sumber pendapatan, pekerjaan, kepatuhan teman sejawat, keadilan, kontak dengan IRS, sanksi, etika, kemungkinan terdeteksi dan tarif pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa teman sejawat mempunyai hubungan penting untuk memprediksi perilaku wajib pajak.

Penelitian Hite (1988) dalam Siahaan (2005) yang berjudul "*The Effect of Peer Reporting Behavior on Tax Payer Compliance*" bertujuan untuk meneliti hubungan perilaku pelaporan teman sesama pembayar pajak (*peers*) terhadap kepatuhan pembayaran pajak. Sembilan puluh tujuh (97) responden berpartisipasi secara sukarela dalam penelitian ini. Sebanyak 65% responden penelitian mengindikasikan bahwa para pembayar pajak melaporkan lebih rendah pendapatan mereka, dan 54% menyatakan bahwa keridakpatuhan mereka disebabkan karena mereka mengetahui bahwa teman mereka sesama pembayar pajak tidak patuh.

Klepper dan Nagin (1989) dalam Siahaan (2005) melaporkan hasil penelitian dalam artikelnya yang berjudul "*Tax Compliance and Perception of The Risks of Detection and Criminal Prosecution*" yang bertujuan untuk mengkaji

hubungan persepsi resiko terdeteksi dan tuntutan kriminal terhadap Kepatuhan pajak serta mengkaji dampak persepsi tersebut terhadap perilaku ketidakpatuhan. Temuan mereka menunjukkan bahwa pembayar pajak sensitif terhadap dampak perilaku ketidakpatuhan mereka terhadap resiko terdeteksi dan tuntutan kriminal dan bahwa resiko tersebut mempunyai hubungan penting terhadap keinginan mereka untuk melakukan ketidakpatuhan. Temuan ini mengindikasikan bahwa pembayar pajak selalu menimbang atau menghitung manfaat dan biaya ketidakpatuhan, tetapi perhitungan mereka nampak mematuhi realitas institusional tentang proses penegakan hukum.

Disertasi Bradley (1994) yang berjudul "*An Empirical Investigation of Factors Affecting Corporate Tax Compliance Behavior*" bertujuan untuk (1) mengidentifikasi faktor-faktor yang menghubungkan kepatuhan pajak (kompleksitas peraturan perpajakan, lingkungan perusahaan, tekanan keuangan, biaya ketidakpatuhan, resiko penyesuaian pemeriksaan dan profil individu), (2) mengembangkan skala untuk mengukur faktor-faktor tersebut, (3) menguji hubungan faktor-faktor tersebut terhadap kepatuhan pajak. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel independen (kompleksitas peraturan perpajakan, lingkungan perusahaan, tekanan keuangan, biaya ketidakpatuhan, resiko penyesuaian pemeriksaan dan profil individu) berhubungan signifikan terhadap perilaku kepatuhan *tax professional*.

Blanthorne (2000) dalam Mustikasari (2007), telah melakukan penelitian tentang ketidakpatuhan pajak yang menggunakan *Theory of Planned Behavior* sebagai dasar untuk pengembangan hipotesisnya. Penelitian ini melibatkan variabel sikap, niat, norma subyektif dan kewajiban moral sebagai variabel

independen yang menghubungkan variabel ketidakpatuhan pajak sebagai variabel dependen.

Rosita (2006), dalam penelitiannya yang berjudul “Hubungan Tingkat Pendidikan, Pekerjaan, dan Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak” telah membuktikan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan dan pekerjaan terhadap kepatuhan pajak badan.

2.7 Hipotesis Penelitian

1. H_0 = Tidak ada hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dengan kepatuhan wajib pajak.

H_1 = Adanya hubungan yang signifikan antar tingkat pendidikan dengan kepatuhan wajib pajak.

2. H_0 = Tidak ada hubungan yang signifikan antara pekerjaan dengan kepatuhan wajib pajak.

H_2 = Adanya hubungan yang signifikan antara pekerjaan dengan kepatuhan wajib pajak.

3. H_0 = Tidak ada hubungan yang signifikan antara penghasilan dengan kepatuhan wajib pajak.

H_3 = Adanya hubungan yang signifikan antara penghasilan dengan kepatuhan wajib pajak.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah status sosial yang terkait yaitu pendidikan dan jenis pekerjaan wajib pajak serta status ekonomi yaitu penghasilan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi yang berdomisili di kota Bukittinggi.

3.2 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah Wajib Pajak Dalam Negeri sebagai subjek pajak orang pribadi yang memiliki NPWP yang berdomisili di kota Bukittinggi.

3.3 Populasi dan Sampel

Sesuai dengan judul, permasalahan yang timbul, pendekatan yang digunakan dan tujuan yang ingin dicapai, penelitian ini dilakukan di wilayah KPP Bukittinggi. Dimana populasi penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang populasi tidak diketahui besarnya sehingga dengan menggunakan jumlah sampel 30 menyatakan bahwa data cukup memadai untuk sampel berukuran besar (Uma Sekaran 2006).

Sedangkan kerangka sampel dalam penelitian ini adalah orang pribadi (dalam hal ini berprofesi sebagai pengusaha) yang memiliki NPWP di Bukittinggi. Metode penerikan sampel yang digunakan yaitu *Judgemental Purposive Sampling Method*, karena pemilihan sampel sesuai dengan karakter

tertentu yang memiliki hubungan dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

Kriteria dari *Judgemental Purposive Sampling Method* adalah wajib pajak Orang Pribadi yang memiliki NPWP atas penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan yang dalam hal ini berprofesi sebagai pengusaha dikota Bukittinggi.

3.4 Identifikasi dan Pengukuran Variabel

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua variabel yaitu variabel dependen dan variabel Independen. Variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel independen terdiri dari tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, penghasilan. Untuk lebih jelasnya, identifikasi dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

1. Variabel independen

- Pendidikan merupakan salah satu indikator yang menentukan dalam status sosial seseorang di lingkungan masyarakat sehingga orang yang memiliki tingkat pendidikan yang baik lebih dihargai dimasyarakat dan biasanya lebih memahami tentang ketentuan hukum khususnya masalah kewajiban membayar pajak. Variabel ini akan diukur dalam bentuk tingkat pendidikan wajib pajak mulai dari pendidikan tingkat SD sampai dengan tingkat Perguruan Tinggi.

Pengukuran atas variabel pendidikan adalah memberikan skor 1 (satu) pada pilihan tingkat pendidikan, dan memberi skor 0 (nol) untuk tingkat pendidikan yg tidak dipilih . Disini digunakan pemberian nilai menurut tingkatan pendidikan karena klasifikasi tersebut memiliki tingkatan

berdasarkan kriteria yang telah ditentukan (jenjang pendidikan). Dengan pembagian atas 5 kategori yaitu SD, SMP, SMA, D3, S1.

- Pekerjaan, variabel ini diukur berdasarkan keprofesionalan pekerjaan wajib pajak. Apakah pekerjaan wajib pajak digolongkan pekerjaan yang profesional atau pekerjaan non profesional. Selain itu juga melihat sudah berapa lama wajib pajak memiliki NPWP, disini penulis mengutamakan wajib pajak yg telah memiliki NPWP minimal 5 tahun pajak.

Pengukuran atas variabel pekerjaan adalah memberikan skor 0 (nol) untuk pekerjaan non profesional, skor 1 (satu) untuk pekerjaan profesional. Karena pada variabel ini klasifikasi yang ada tidak menunjukkan tingkatan apa-apa, sifatnya hanya memilih.

- Penghasilan pengusaha diukur berdasarkan omzet yang dihasilkan. Omzet yang besar akan berhubungan pada besarnya jumlah pajak yang dibayarkan. Variabel ini akan diukur dalam bentuk rupiah, tetapi bukan data rupiah yang sesungguhnya melainkan dalam rentang yang dibuat berdasarkan aturan Bank Indonesia. Yaitu dengan pembagian tingkatan penghasilan < Rp.500.000.000 (mikro), Rp.500.000.000 – Rp.1.000.000.000,- (kecil), > Rp 1.000.000.000,- (menengah).

Pengukuran atas variabel penghasilan adalah memberikan skor 1 (satu) untuk omzet yang dipilih dan memberikan skor 0 (nol) untuk omzet yang tidak dipilih.

2. Variabel dependen

Kepatuhan dalam perpajakan dapat diartikan tingkat sampai dimana wajib pajak mematuhi Undang-Undang Perpajakan. Untuk

kebutuhan penelitian, analisis korelasi yang dipilih sebagai teknik analisis dalam penelitian ini dengan melihat hubungan variabel independen dengan kepatuhan wajib pajak. Ukuran yang digunakan yaitu scale. Untuk nominal hanya memberikan dua pilihan saja tanpa arti apa-apa, tetapi disini masing-masing pilihan diberikan nilai yang ditentukan peneliti dimana memberikan nilai yang lebih tinggi untuk jawaban yang menunjukkan si responden.

Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai indikator dalam mengidentifikasi kepatuhan wajib pajak yaitu dalam hal penghitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak terhutang.

- Penghitungan pajak terhutang

Mencakup kegiatan penghitungan penghasilan yang dikenai pajak dalam tahun pajak untuk keperluan pengisian SPT (Surat Pemberitahuan).

- Pelaporan Pajak Terhutang

Mencakup kegiatan melaporkan SPT yang sudah diisi ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak) dimana Wajib pajak terdaftar.

- Pembayaran Pajak Terhutang

- Mencakup kegiatan membayar pajak terhutang ke kas Negara melalui Kantor Pos atau Bank atau tempat pembayaran lain ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Pengukuran atas variabel dependen:

a. Penghitungan pajak terutang

- Memberikan skor 1 (satu) apabila pernah menerima SKP/STP akibat kesalahan pengisian SPT dan Skor 2 (dua) apabila tidak pernah menerima SKP/STP akibat kesalahan pengisian SPT.
- Memberikan skor 1 (satu) apabila pernah menerima SKPKB dan 2 (dua) apabila tidak pernah menerima SKPKB.
- Memberikan skor 1 (satu) apabila pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan dan skor 2 (dua) apabila tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana di bidang Perpajakan.

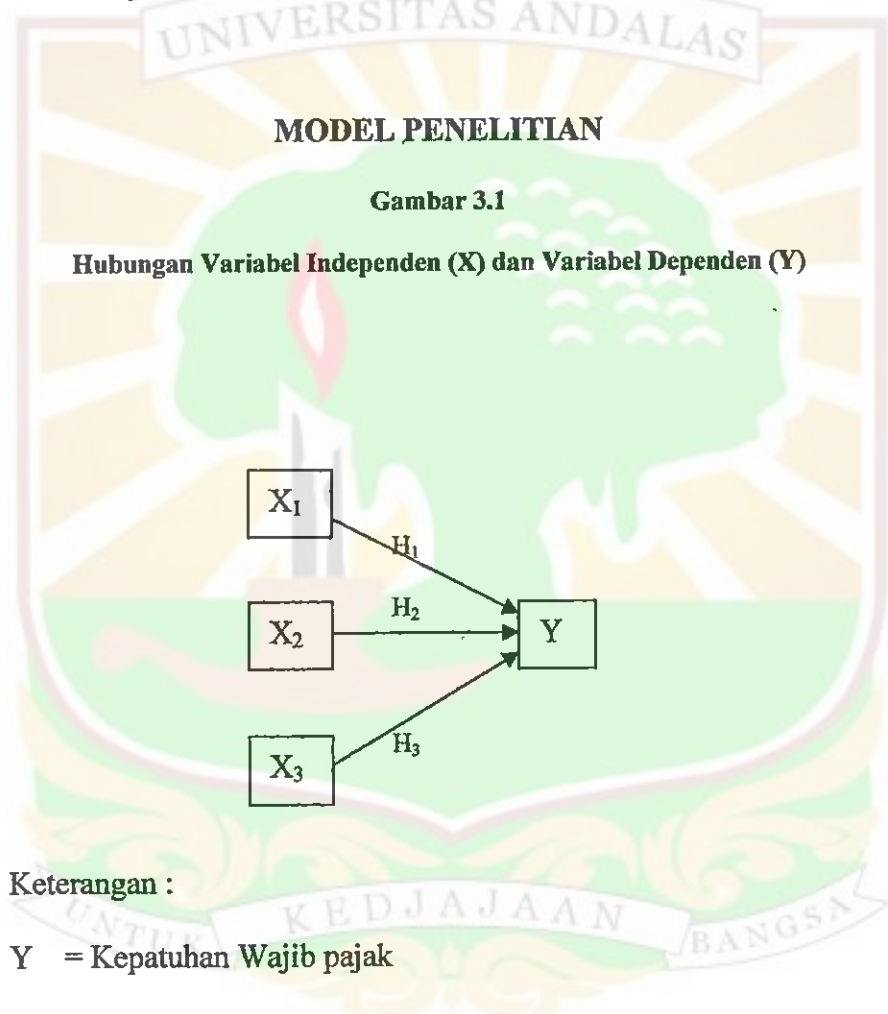
b. Pelaporan Pajak Terutang

Memberikan skor 1 (satu) untuk yang memilih tidak tepat waktu dalam penyampaian SPT, skor 2 (dua) untuk yang memilih hanya kadang-kadang tepat waktu dalam penyampaian SPT, dan skor 3 (tiga) untuk yang memilih tepat waktu dalam penyampaian SPT.

c. Pembayaran Pajak Terutang

- Memberikan skor 1 (satu) apabila pernah terkena sanksi dalam membayar pajak pada tahun berjalan dan skor 2 (dua) apabila tidak pernah terkena sanksi dalam membayar pajak pada tahun berjalan.
- Memberikan skor 1 (satu) apabila pernah terkena sanksi dalam membayar pajak pada akhir tahun dan skor 2 (dua) apabila tidak pernah terkena sanksi dalam membayar pajak pada akhir tahun.

- Memberikan skor 1 (satu) apabila pernah melakukan penunggakan pajak dan skor 2 (dua) apabila tidak pernah melakukan penunggakan pajak.
- Hasil dari setiap skor kepatuhan ini dijumlahkan untuk setiap responden, dan jumlah skor tersebut yang akan di hitung dan digunakan untuk diolah dan digunakan di dalam SPSS.



3.5 Metode Pengumpulan Data

3.5.1 Teknik Pengumpulan Data

Data primer dikumpulkan dengan pengisian kuesioner. Penelitian dilakukan dengan survey dan langsung turun kelapangan bertatap muka dengan responden yang akan mengisi kuesioner. Peneliti meminta responden mengisi kuesioner tersebut dan memberikan waktu untuk responden mengisinya sendiri tanpa campur tangan peneliti. Beberapa hari kemudian peneliti meminta kuesioner yang telah diisi oleh responden. Sebelum menyebar kuesioner peneliti membarikan beberapa pertanyaan kepada responden untuk mengetahui responden cocok atau tidak untuk menjadi salah satu sampel dari penelitian, dengan syarat responden sebagai berikut:

1. Telah memiliki usaha dan NPWP lebih dari 5 tahun.
2. Umur minimal 25 tahun.

Sebelum kuesioner disebar peneliti terlebih dahulu menguji validitas dan reliabilitas kuesioner kepada mahasiswa dan warga kampus agar bisa mengetahui kuesioner tersebut sudah dapat digunakan atau tidak. Dengan melakukan uji validitas dan reliabilitas. Valid artinya data yang diperoleh dengan penggunaan instrumen dapat menjawab tujuan penelitian. Reliabel artinya konstan atau stabil jika dilakukan penelitian pada waktu yang berbeda dan tempat yang berbeda.

Setelah melakukan uji tersebut barulah kuesioner di sebar kepada responden.

3.5.2 Instrumen Penelitian

Data primer dirancang secara terbuka, karena tuntunan topik dan pendekatan penelitian yang memiliki implikasi metodologis. Penelitian dengan survey sehingga terhadap masing-masing variabel penelitian akan digunakan

instrumen yang berbeda satu sama lainnya. Selanjutnya variabel dan indikator yang akan diteliti melalui instrumen yang telah ditetapkan akan dijelaskan dalam tabel 3.1 dibawah ini:

Tabel 3.1
Instrumen Penelitian

Variabel	Indikator
1. Variabel independen	
Pendidikan	Tingkat Pendidikan : • SD • SMP • SMA • Diploma • Sarjana
Jenis Pekerjaan	Kategori Pekerjaan • Pekerjaan Profesional • Pekerjaan Non Profesional
Penghasilan	Besar Omzet
2. Variabel dependen	
Penghitungan Pajak	1. Pengisian SPT 2. Cara Penghitungan SPT 3. Sanksi Pidana
Pelaporan pajak	Waktu pelaporan
Pembayaran pajak	1. Ketaatan pembayaran 2. Waktu pembayaran 3. Penunggakan

Sumber : Data diolah 2012

3.5.3 Teknik Analisis Data

Untuk menjawab pertanyaan penelitian dan dalam rangka membuktikan hipotesis penelitian, yang akan dianalisis hanya data primer hasil pengisian kuesioner dengan responden menggunakan korelasi. Teknik korelasi ini digunakan untuk menganalisis hubungan variabel tingkat pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan dengan variabel kepatuhan wajib pajak. Korelasi dipilih sebagai teknik analisis dalam penelitian ini karena peneliti ingin meneliti apakah terdapat hubungan antara variabel independen dan dependen, dengan cara *collecting skor* yaitu dengan menjumlahkan skor yang telah ditetapkan dari jawaban responden. Dimana pilihan jawaban memiliki nilai.

Hasil pengujian hipotesis pada analisis korelasi dapat kita lihat pada:

1. Besarnya koefisien korelasi (τ)

Jika koefisien korelasinya menunjukkan angka:

- 0,801 – 1 berarti hubungan antara kedua variabel sangat kuat.
- 0,601 – 0,8 berarti hubungan antara kedua variabel kuat.
- 0,401 – 0,6 berarti hubungan antara kedua variabel cukup kuat.
- 0,201 – 0,4 berarti hubungan antara kedua variabel lemah.
- 0,001 – 0,2 berarti hubungan antara kedua variabel sangat lemah.

(Nugroho 2005)

2. Tanda pada awal angka koefisien korelasi menunjukkan arah hubungan kedua variabel. Jika tanda positif, menunjukkan hubungan antara kedua variabel memiliki pola positif atau serah. Sedangkan jika tandanya negatif berarti hubungan kedua variabel tersebut berpola negatif atau berlawanan arah.

3. Uji hipotesis

H_0 = tidak ada terdapat hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.

H_1 = adanya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.

H_0 diterima jika $\tau = 0$ dan angka probabilitas (signifikansi) $>0,05$

H_1 diterima jika $\tau \neq 0$ dan angka probabilitas (signifikansi) $<0,05$

4. Dasar pengambilan keputusan

- Angka Probabilitas yang dipakai 5%
 - Jika angka probabilitas (signifikansi) merupakan $<0,05$ berarti antara variabel independen dengan variabel dependen memiliki hubungan.
 - Jika angka probabilitas (signifikansi) menunjukkan $>0,05$ berarti antara variabel independen dengan variabel dependen tidak memiliki hubungan.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data

4.1.1 Cara Pengumpulan Data

Seperti yang telah dijelaskan dalam metodologi penelitian, bahwa data yang diambil untuk penelitian ini adalah data primer. Data primer berkaitan dengan hasil pengukuran terhadap variabel independen yang terdiri dari tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan penghasilan wajib pajak, serta hasil pengukuran atas variabel dependen yang terdiri dari penghitungan pajak terutang, pelaporan pajak terutang dan pembayaran pajak terutang, sampel dalam penelitian ini adalah orang pribadi (dalam hal ini berprofesi sebagai pengusaha) yang memiliki NPWP di kota Bukittinggi.

Data primer ini didapatkan dengan turun langsung kelapangan menggunakan instrumen penelitian berupa angket kuesioner. Peneliti meminta responden untuk mengisi kuesioner tersebut dan memberikan waktu untuk responden mengisinya sendiri tanpa campur tangan peneliti. Beberapa hari kemudian peneliti kembali meminta kuesioner yang telah diisi oleh responden.

4.1.2 Waktu, Tempat Penelitian dan Jumlah Responden

Adapun penyebaran kuesioner dan wawancara yang dilakukan kepada responden adalah dari pertengahan bulan Februari sampai pertengahan bulan Maret 2012. Penyebaran kuesioner tersebut dilakukan dengan mendatangi responden dilokasi/tempat responden berada. Kemudian meminta kesediaan

responden untuk mengisi kuesioner yang diajukan kepada mereka. Sebagian responden mengisi kuesioner pada saat diberikan dan sebagian lagi kusioner di tinggalkan dan di ambil lagi sesuai waktu yang dijanjikan oleh responden. Jumlah responden dengan hasil sebagai berikut:

Jumlah kuesioner yang dikirim	= 60
Jumlah kuesioner yang kembali	= 48
Jumlah kuesioner yang kembali tetapi pengisian tidak lengkap	= 12
Jumlah kuesioner yang memenuhi syarat untuk analisis akhir	= 36

4.2 Uji Validitas dan Reabilitas Instrumen

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang bermutu dan baik, sudah semestinya jika rangkaian penelitian yang dilakukan harus baik juga. Perencanaan yang matang mutlak diperlukan, lalu instrumen penelitian juga harus dalam keadaan telah teruji kevaliditasannya dan reliabilitasnya. Penelitian yang mengukur variabel dengan menggunakan instrumen dalam kuesioner, harus di uji kualitas datanya dengan uji validitas dan reliabilitas. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah instrumen itu valid/sahih atau reliabel, sehingga bisa mendukung hipotesis yang akan di uji. Valid artinya data yang diperoleh dengan penggunaan instrumen dapat menjawab tujuan penelitian. Reliabel artinya konstan atau stabil jika dilakukan penelitian pada waktu yang berbeda dan tempat yang berbeda.

Untuk kepentingan pembuatan kuesioner, pertanyaan-pertanyaan yang terkait pada variabel dependen dan independen mengacu pada penelitian Rosita yang mengulas tentang kepatuhan wajib pajak dimana peneliti mengacu pada indikator-

indikator yang digunakan pada variabel kepatuhan ini. Sedangkan variabel independennya peneliti merancang pertanyaan-pertanyaan.

Dalam keperluan pengujian validitas dan reabilitas ini, terlebih dahulu kuesioner disebarakan kepada 15 sampel. Dari hasil pengolahan data ini terlihat:

Interpretasi:

1. Tabel KMO dan Bartlett’s Test

Tabel 4.1
Uji validitas
KMO and Bartlett’s test

Kaiser-Mayer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.727
Bartlett’s test of Sphericity	Approx.chi-square	40.648
	df	6
	Sig.	.000

Sumber : Data diolah 2012

Uji validitas dimaksud untuk memastikan bahwa masing-masing pertanyaan akan terklasifikasi pada variabel yang telah ditetapkan (construct validity), uji validitas menggunakan *Factor analysis*. *Factor analysis* dilakukan dengan metode *Varimax Retation* yang dimasukkan. Selain itu uji Validitas juga dapat dilihat dari besarnya nilai Kaiser ‘MSA (Rosita). Untuk mengidentifikasikan construct validity dari suatu instrumen penelitian, diharapkan suatu kuesiner memiliki Kaiser ‘MSA besar atau sama dengan 0,5. Pada tabel KMO dan Bartlett’s Test terlihat Kaiser-Mayer-Olkin Measure of sampling adequacy menunjukkan angka 0,727 (>0,5) yang berarti bahwa instrumen dapat dikatakan valid.

2. Tabel Reliability Statistics

Tabel 4.2
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.758	4

Sumber : Data diolah 2012

Uji reliabilitas dilakukan untuk menganalisis sejauh mana hasil pengukuran serta tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran lebih dari satu kali terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat ukur yang sama. Uji Reliabilitas dapat dilihat dari nilai cronbach's alpha. Instrumen dikatakan reliabel jika memiliki cronbach alpha lebih dari 0,5. Pada tabel Reliability Statistics terlihat cronbach's alpha menunjukkan angka 0,758 ($>0,5$) yang berarti bahwa variabel tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan penghasilan memiliki tingkat keandalan sebesar 75,8% dalam menentukan variabel tingkat kepatuhan wajib pajak.

4.3 Pembahasan dan Interpretasi Hasil Penelitian

4.3.1 Deskripsi Variabel

1. Variabel Independen

a. Tingkat pendidikan

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa tingkat pendidikan merupakan jenjang pendidikan yang ditempuh oleh seseorang yang dalam hal ini diperinci menjadi SD, SMP, SMA, Diploma, Sarjana. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan semakin tinggi tingkat Kepatuhan sebagai Wajib pajak (*Tax Payer's*).

Tabel 4.3
Jumlah Responden pada Tingkat Pendidikan

TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH RESPONDEN
SD	0
SMP	0
SMU	15
DIPLOMA	3
SARJANA	18

Sumber : Data diolah 2012

b. Pekerjaan

Pekerjaan dibagi menjadi pekerjaan yang membutuhkan *skill* yang bisa dikategorikan menjadi pekerjaan Profesional, dan ada pekerjaan yang tidak membutuhkan *skill* yang dikategorikan menjadi pekerjaan Non Profesional. Semakin Profesional (semakin membutuhkan *skill*) pekerjaan seseorang maka semakin tinggi tingkat kepatuhan sebagai wajib pajak (*Tax Payer's*).

Tabel 4.4
Jumlah Responden pada Pekerjaan

PEKERJAAN	JUMLAH RESPONDEN
PROFESIONAL	24
NON PROFESIONAL	12

Sumber : Data diolah 2012

c. Penghasilan

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa omzet dianggap dapat menggambarkan penghasilan seseorang, maka omzet dipakai sebagai indikator pada penghasilan menurut ukuran Bank Indonesia, usaha dibagi

atas 3 kelompok berdasarkan omzet yaitu usaha mikro (omzet < Rp 500.000.000), usaha kecil (omzet Rp 500.000.000,- – Rp 1.000.000.000,-), dan usaha menengah (omzet > Rp 1.000.000.000,-). Semakin tinggi penghasilan maka akan semakin tinggi kepatuhan sebagai wajib pajak (*Tax Payer's*).

Tabel 4.5
Jumlah Responden pada Penghasilan

PENGHASILAN	JUMLAH RESPONDEN
< 500 JUTA	27
500 JUTA – 1M	8
>1 M	1

Sumber : Data diolah 2012

Tabel 4.6
Pendidikan

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
kepatuhan	14,14	,961	36
pendidikan_sma	,42	,500	36
pendidikan_D3	,08	,280	36
pendidikan_S1	,50	,507	36

Sumber : Data diolah 2012

Dari tabel 4.4 diatas dapat kita lihat mean untuk pendidikan SMA 0,42% yang berarti 15 orang dari 36 responden berpendidikan SMA. Untuk tingkat pendidikan D3 memiliki nilai mean 0,08% yang berarti 3 orang dari 36 responden berpendidikan D3, sedangkan untuk pendidikan S1 memiliki nilai mean 0,50% yang berarti 18 orang dari 36 responden berpendidikan S1.

Tabel 4.7
Pekerjaan

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
kepatuhan	14,14	,961	36
pekerjaan	,67	,478	36

Sumber : Data diolah 2012

Dari tabel 4.5 diatas dapat kita lihat mean bahwa dari 36 orang responden 0,67% diantaranya memiliki pekerjaan yang professional.

Tabel 4.8
Penghasilan

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
kepatuhan	14,14	,961	36
penghasilan_ <500jt	,72	,454	36
penghasilan_ 500jt-1M	,22	,422	36

Sumber : Data diolah 2012

Dari tabel 4.6 diatas dapat kita lihat untuk penghasilan yang < 500.000.000 memiliki persentase 0,72% yang berarti 27 orang dari 36 responden berpenghasilan < 500.000.000. Untuk penghasilan 500.000.000 – 1.000.000.000 memiliki persentase 0,22% yang berarti 8 orang dari 36 responden berpenghasilan 500.000.000 – 1.000.000.000.

2. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan dalam perpajakan dapat diartikan sebagai tingkat sampai dimana wajib pajak mematuhi Undang-Undang Perpajakan. Dalam menentukan kepatuhan wajib pajak, pertanyaan akan diberikan kepada responden untuk dijawab, semenjak usaha dimulai sampai dengan kuesioner berada ditangan responden.

Indikator untuk kepatuhan wajib pajak terdiri dari (1) penghitungan pajak terutang, (2) pelaporan pajak terutang, (3) pembayaran pajak terutang.

Yang dimaksud penghitungan pajak terutang disini adalah mencakup ketentuan dalam kegiatan penghitungan penghasilan yang dikenai pajak dalam tahun pajak untuk keperluan pengisian SPT (Surat Pemberitahuan), wajib pajak yang patuh akan berupaya penuh mengerti dalam hal penghitungan pajak terutang agar terhindar dari kesalahan dalam penghitungan pajak terutang. Pelaporan pajak terutang adalah mencakup tepat waktu atau tidaknya wajib pajak dalam kegiatan melaporkan SPT yang sudah diisi ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak) dimana wajib pajak terdaftar. Pembayaran pajak terutang adalah mencakup kepatuhan dalam kegiatan membayar pajak terutang ke kas negara melalui Kantor Pos atau Bank BUMN/BUMD atau tempat pembayaran lain ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Hasil pengumpulan data dari variabel kepatuhan wajib pajak terlihat pada tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.9
Descriptive Statistics Kepatuhan Wajib Pajak

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
Kepatuhan	36	14.14	.961	12	15

Sumber : Data diolah 2012

Dari tabel terlihat variabel kepatuhan wajib pajak nilai min = 12 dan max = 15 yang berarti total nilai terendah dari seluruh pertanyaan yang ada pada variabel kepatuhan wajib pajak yang dikumpulkan oleh responden yaitu 12 dan nilai tertinggi yaitu 15. Nilai ini didapatkan dari penjumlahan setiap nilai dari beberapa pertanyaan tentang kepatuhan wajib pajak yang diberikan.

4.3.2 Pengolahan dan Analisis Data

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa tujuan penelitian ini adalah menguji hubungan antara tingkat pendidikan, pekerjaan, penghasilan wajib pajak Dalam Negeri Pribadi yang berprofesi sebagai pengusaha di Kota Bukittinggi dengan tingkat kepatuhannya sebagai wajib pajak dengan menggunakan analisis korelasi. Hubungan ini dapat diketahui dari pengolahan data yang dikumpulkan melalui kuesioner. Dari hasil tersebut, maka data ini telah siap diolah kedalam program SPSS 15.0. dari pengolahan data tersebut maka didapatkan hasil seperti dibawah ini:

4.3.2.1 Uji Validitas dan Reabilitas

1. Uji Validitas

Tabel 4.10
KMO and Bartlett's test

Kaisee-Mayer-olkin Measure of Sampling Adequancy		0.667
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	83.406
	df	6
	Sig.	0

Sumber : Data diolah 2012

Pada tabel KMO dan Bartlett's Test terlihat Kaiser-Mayer-Olkin Measure of sampling adequacy menunjukkan angka 0,667 (> 0,5) yang berarti bahwa instrumen dapat dikatakan valid.

2. Uji Reabilitas

Tabel 4.11
Reability Statistics

Cronbach's Alpha	N of items
0.768	4

Sumber : Data diolah 2012

Pada tabel Reliability Statistic terlihat cronbach' alpha menunjukkan angka 0,768 ($> 0,5$) yang berarti bahwa variabel tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan penghasilan memiliki tingkat keandalan sebesar 76,8 % dalam menentukan variabel tingkat kepatuhan wajib pajak.

4.3.2.2 Pengujian Hipotesis

Tabel 4.12
Hasil Regresi Pendidikan

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	9,628	2	4,814	7,005	,003 ^a
	Residual	22,678	33	,687		
	Total	32,306	35			

a. Predictors: (Constant), pendidikan_S1, pendidikan_D3

b. Dependent Variable: kepatuhan

Sumber : Data diolah 2012

Dari tabel 4.10 dapat kita lihat nilai F adalah 7,005 dengan Signifikansi 0,003 yang berarti bahwa variabel pendidikan memiliki hubungan yang signifikan dengan kepatuhan wajib pajak. Dari hipotesis yang telah dibuat bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin banyak pengetahuan yang diterima wajib pajak di lingkungan pendidikan juga di lingkungan pergaulannya. Mereka akan lebih mengerti manfaat membayar pajak dan sanksi yang diterima jika tidak membayar pajak tersebut. Dari hasil ini dapat kita simpulkan bahwa hubungan kedua variabel ini kuat dan H_1 diterima.

Tabel 4.13
Hasil Regresi Pekerjaan

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5,556	1	5,556	7,061	,012 ^a
	Residual	26,750	34	,787		
	Total	32,306	35			

a. Predictors: (Constant), pekerjaan

b. Dependent Variable: kepatuhan

Sumber : Data diolah 2012

Dari tabel diatas dapat kita lihat nilai F adalah 7,061 dan signifikansi nya 0,012 yang berarti bahwa variabel pekerjaan memiliki hubungan yang signifikan dengan kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan hipotesis pada pendidikan, semakin professional pekerjaan seseorang maka akan meningkat pula kepatuhannya terhadap pajak, yang bisa dipengaruhi oleh pergaulan atau lingkungan kerjanya. Dari hasil ini dapat kita simpulkan bahwa hubungan kedua variabel ini kuat dan H_1 diterima.

Tabel 4.14
Hasil Regresi Penghasilan

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3,815	2	1,908	2,210	,126 ^a
	Residual	28,490	33	,863		
	Total	32,306	35			

a. Predictors: (Constant), penghasilan_ 500jt-1M, penghasilan_ <500jt

b. Dependent Variable: kepatuhan

Sumber : Data diolah 2012

Dari tabel diatas dapat kita lihat nilai F adalah 2,210 dan signifikansi nya 0,126 yang berarti bahwa variabel penghasilan tidak memiliki hubungan dengan kepatuhan wajib pajak. Karna kecilnya nilai nilai F dan besar nya nilai signifikannya dari 0,05. Dari hasil ini dapat kita simpulkan bahwa penghasilan dan kepatuhan wajib pajak tidak memiliki hubungan.

4.4 Uraian dan Analisis

Berdasarkan analisis korelasi terhadap variabel-variabel yang signifikan atau yang memiliki hubungan, diketahui berapa besar koefisien korelasi antara variabel X_1 , X_2 , dan X_3 dengan Y yang menunjukkan apakah ada hubungan antara variabel atau tidak.

1. Koefisien korelasi variabel tingkat (X_1) adalah positif sebesar 7.005 terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hubungan positif ini dapat diartikan bahwa antara tingkat pendidikan dengan kepatuhan wajib pajak memiliki hubungan atau pola searah. Maksudnya semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dugaan semula adalah variabel ini akan berkorelasi positif dengan variabel kepatuhan wajib pajak yang artinya dengan semakin meningkat tingkat pendidikan berarti kepatuhan wajib pajak meningkat pula. Dengan demikian analisis yang dilakukan terhadap data primer menunjukkan bahwa dugaan atau hipotesis tersebut benar karena dapat terbukti.

Hubungan positif ini dapat terjadi karena semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak maka semakin tinggi pula kesadaran wajib pajak akan perannya sebagai wajib pajak dan kesadarannya akan pentingnya pajak bagi negara untuk kepentingan bersama. Dimana pajak sangat berperan penting dalam pembangunan. Sehingga wajib pajak menyadari bahwa dampak negatif yang timbul jika tidak membayar pajak. Mengingat betapa pentingnya pajak bagi penyelenggaraan negara.

2. Koefisien korelasi variabel pekerjaan (X_2) adalah positif sebesar 7.061 terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Hubungan positif ini dapat diartikan bahwa antara pekerjaan dengan kepatuhan wajib pajak memiliki hubungan atau pola searah. Maksudnya semakin profesional pekerjaan wajib pajak semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dugaan semula adalah variabel ini akan berkorelasi positif dengan variabel kepatuhan wajib pajak atau semakin profesional pekerjaan wajib pajak maka akan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian analisis yang dilakukan terhadap data primer menunjukkan bahwa dugaan atau hipotesis tersebut benar karena dapat terbukti.

Hubungan positif ini dapat terjadi karena responden yang memiliki pekerjaan yang profesional akan berusaha untuk meningkatkan kepatuhan pajak agar citranya juga meningkat ataupun terjaga dimata masyarakat. Sedangkan responden yang pekerjaannya tidak profesional kebanyakan kurang memperhatikan citranya sehingga mereka kurang peduli akan kewajibannya terhadap perpajakan karena tidak ada hubungannya terhadap mereka.

3. Untuk variabel penghasilan (X_3), didapat angka koefisien korelasi adalah positif sebesar 2.210 terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Tetapi pada signifikansi variabel ini menunjukkan $>0,05$ yaitu 0,126. Dengan kata lain variabel ini tidak ada hubungan dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rosita 2006) yang hasilnya

menunjukkan bahwa tidak adanya hubungan penghasilan dengan kepatuhan wajib pajak.

Dugaan semula adalah bahwa variabel ini memiliki hubungan dengan variabel kepatuhan wajib pajak, karena semakin besarnya penghasilan wajib pajak, maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Sedangkan analisis yang dilakukan terhadap data primer menunjukkan bahwa dugaan atau hipotesis tersebut tidak terbukti.

Tidak terdapatnya hubungan antara penghasilan dengan kepatuhan wajib pajak terjadi karena kepatuhan tidak tergantung pada besar kecilnya penghasilan wajib pajak tetapi pada individual wajib pajak. Rata-rata responden yang memiliki penghasilan besar malah yang tidak patuh pada kewajiban perpajakannya. Sedangkan responden yang penghasilannya tidak begitu besar patuh terhadap perpajakan. Seringkali wajib pajak yang memiliki penghasilan besar melakukan penggelapan pajak yang menyebabkan kerugian yang besar terhadap pajak dan negara karena memiliki kekuatan pada keuangan untuk melakukan penyuapan pada aparat pajak. Lain halnya dengan wajib pajak yang penghasilannya tidak terlalu besar. Mereka lebih memikirkan keamanan dalam menjalankan usaha dan mereka kurang mampu untuk melakukan penggelapan pajak karena minimnya penghasilan. Hal inilah yang menyebabkan hipotesis tidak terbukti.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa terdapatnya hubungan yang signifikan antara variabel tingkat pendidikan (X_1) dan pekerjaan (X_2) dengan variabel kepatuhan wajib pajak (Y). Tingkat pendidikan dan pekerjaan memiliki hubungan yang kuat dengan kepatuhan wajib pajak. Hubungan positif ini dapat diartikan bahwa antara tingkat pendidikan dan pekerjaan dengan kepatuhan wajib pajak memiliki hubungan atau pola searah. Maksudnya semakin tinggi tingkat pendidikan dan semakin profesional pekerjaan wajib pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak maka semakin tinggi pula kesadaran wajib pajak akan perannya sebagai wajib pajak sehingga wajib pajak menyadari bahwa banyak dampak negatif yang akan timbul jika tidak membayar pajak. Hubungan positif pada pekerjaan dapat terjadi karena responden yang memiliki pekerjaan yang profesional akan berusaha untuk meningkatkan kepatuhan pajaknya agar citranya juga akan meningkat ataupun terjaga dimata masyarakat.

Sedangkan variabel penghasilan (X_3) tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat pada angka koefisiennya yang lemah dan angka signifikannya yang $> 0,05$. Kepatuhan wajib pajak tidak tergantung pada besar kecilnya penghasilan wajib pajak tetapi tergantung pada individual wajib pajak. Kebanyakan wajib pajak yang memiliki

penghasilan yang besar malah lebih tidak patuh dibandingkan wajib pajak yang penghasilannya kurang besar. Hal ini diakibatkan kurangnya kesadaran si wajib pajak akan pentingnya pajak itu sendiri.

5.2 Implikasi dan Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan diatas, maka beberapa implikasi dan saran berikut dapat menjadi bahan pemikiran untuk menghadapi ketidakjelasan peraturan yang berlaku.

5.2.1 Implikasi dan Saran Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Dalam rangka mengefisienkan beban perpajakan atau total biaya pajak, maka wajib pajak perusahaan haruslah meningkatkan kepatuhannya akan kewajibannya terhadap pajak. Untuk itu disarankan agar dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Wajib pajak perusahaan harus memiliki pengetahuan tentang perpajakan untuk dapat mengevaluasi institusi pajak pada tingkat kebijakan, organisasi serta operasional dalam memahami berbagai lingkup dan implikasi dari administrasi perpajakan, agar wajib pajak dapat melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik.
2. Wajib pajak agar lebih aktif dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Untuk mengurangi kesalahan lebih besar dalam perpajakan, maka apabila terdapat keraguan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku sebaiknya permohonan penegasan atau penjelasan dari fiskus diajukan tertulis.
3. Diharapkan bagi wajib pajak yang memiliki masalah perpajakan sebaiknya langsung meminta penjelasan kepada aparat pajak yang berwenang.

5.2.2 Implikasi dan Saran bagi Perbaikan Institusi Perpajakan (Pemerintah)

Dalam menghadapi globalisasi dan sejalan dengan era reformasi serta kesimpulan hasil studi di atas, maka institusi perpajakan sebaiknya melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Agar dalam pemeriksaan fiskus tidak terfokus pada wajib pajak yang memiliki penghasilan yang besar saja.
2. Membuat peraturan perpajakan yang jelas atas aspek-aspek perpajakan bagi wajib pajak pribadi, sehingga tidak menimbulkan keraguan baik bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya maupun bagi fiskus dalam melakukan pemeriksaan pajak.
3. Peraturan perpajakan yang diterbitkan agar disebarluaskan kepada wajib pajak melalui penyuluhan perpajakan dengan menerbitkan majalah perpajakan, mengisi rubrik konsultasi perpajakan pada media masa dan memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk memperoleh peraturan-peraturan yang dimaksud baik melalui buku-buku perpajakan maupun melalui internet.
4. Memberikan pengetahuan tentang pajak sejak dini, misalnya dengan mulai mengenalkan tentang pajak dan betapa pentingnya peran pajak dalam pembangunan negara mulai dari tingkat pendidikan terendah.
5. Melakukan pembinaan terhadap sumber daya fiskus dengan jalan peningkatan kemampuan teknis dan melakukan pengawasan terhadap aparatur pajak agar tidak terjadi kolusi dan korupsi dengan memberikan sanksi hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku jika terbukti merugikan negara.

6. Supaya fiskus tidak pandang bulu dalam pelaksanaan pajak, tanpa melihat pendidikan, pekerjaan, maupun penghasilan wajib pajak itu sendiri.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menjaga kemurnian penelitian ini, namun karena keterbatasan waktu dan biaya, maka skripsi ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain:

1. Sulitnya mendapatkan data dari wajib pajak karena hampir sebagian responden merahasiakan masalah perpajakannya karena takut diketahui kewajiban perpajakannya oleh orang lain.
2. Sampel yang dipakai untuk menunjukkan tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan penghasilan dalam penelitian ini mungkin belum bisa mewakili dari sekian banyak wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama wilayah Bukittinggi.
3. Penelitian ini mempunyai kemungkinan bias perceptual. Karena data yang dianalisis dalam penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner yang berdasarkan pada persepsi jawaban responden. Hal ini akan menimbulkan masalah jika persepsi responden berbeda dengan keadaan yang sebenarnya yang bisa disebabkan oleh latar belakang budaya, didikan orang tua, dan lain-lain.
4. Waktu penelitian yang singkat sebab penelitian ini dilakukan kurang dari satu tahun.
5. Keterbatasan sampel, karena sampel yang sedikit. Jadi penelitian ini kurang mewakili sampel secara keseluruhan.

LAMPIRAN 1 DAFTAR PERTANYAAN

Isi dan beri tanda (X) pada pilihan yang anda anggap paling sesuai :

IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama responden = (boleh tidak diisi)
2. Umur responden =
3. Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) yang terdaftar di KPP =

I. VARIABEL INDEPENDEN

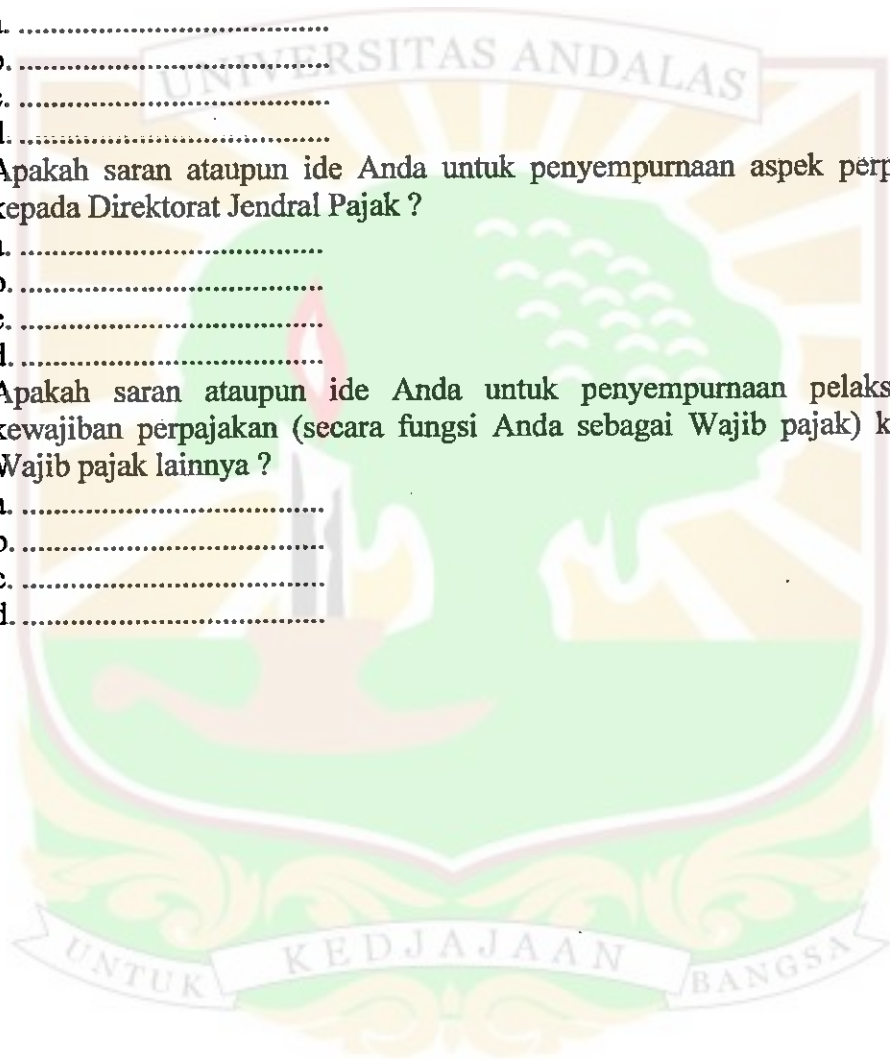
1. Pendidikan
Tingkat pendidikan
☐ SD ☐ Diploma
☐ SMP ☐ Sarjana
☐ SMA
2. Pekerjaan
☐ Pekerjaan Profesional ☐ Pekerjaan Non Profesional
3. Penghasilan
Berapakah kira-kira omzet anda setahun :
☐ Rp. < 500 juta,- ☐ Rp. > 1 miliar
☐ Rp. 500juta – 1 miliar

II. VARIABEL DEPENDEN

1. Penghitungan Pajak
 - a. Apakah Anda pernah menerima Surat Tagihan Pajak (STP) akibat kesalahan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) ?
☐ Ya ☐ Tidak
 - b. Apakah Anda pernah menerima Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)?
☐ Ya ☐ Tidak
 - c. Apakah Anda pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan ?
☐ Ya ☐ Tidak
2. Pelaporan Pajak
Apakah Anda tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)?
☐ Ya ☐ Kadang-kadang ☐ Tidak
3. Pembayaran Pajak
 - a. Apakah Anda Pernah terkena sanksi dalam hal membayar pajak pada tahun berjalan ?
☐ Ya ☐ Tidak
 - b. Apakah Anda pernah terkena sanksi dalam hal membayar pajak pada akhir tahun ?
☐ Ya ☐ Tidak
 - c. Apakah Anda pernah melakukan penunggakan pajak ?
☐ Ya ☐ Tidak

III. CATATAN KHUSUS WAJIB PAJAK

1. Apakah permasalahan-permasalahan perpajakan spesifik yang telah atau sedang anda alami ?
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
2. Apakah Anda telah menemukan jalan keluar atas permasalahan perpajakan yang sedang Anda hadapi tersebut ? Jika ya, harap jelaskan dengan singkat dibawah ini !
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
3. Apakah saran ataupun ide Anda untuk penyempurnaan aspek perpajakan kepada Direktorat Jendral Pajak ?
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
4. Apakah saran ataupun ide Anda untuk penyempurnaan pelaksanaan kewajiban perpajakan (secara fungsi Anda sebagai Wajib pajak) kepada Wajib pajak lainnya ?
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.



LAMPIRAN 2 OUTPUT SPSS 15.0

Pendidikan

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
kepatuhan	14,14	,961	36
pendidikan_sma	,42	,500	36
pendidikan_D3	,08	,280	36
pendidikan_S1	,50	,507	36

Correlations

		kepatuhan	pendidikan_sma	pendidikan_D3	pendidikan_S1
Pearson Correlation	kepatuhan	1,000	-,540	,062	,498
	pendidikan_sma	-,540	1,000	-,255	-,845
	pendidikan_D3	,062	-,255	1,000	-,302
	pendidikan_S1	,498	-,845	-,302	1,000
Sig. (1-tailed)	kepatuhan	.	,000	,360	,001
	pendidikan_sma	,000	.	,067	,000
	pendidikan_D3	,360	,067	.	,037
	pendidikan_S1	,001	,000	,037	.
N	kepatuhan	36	36	36	36
	pendidikan_sma	36	36	36	36
	pendidikan_D3	36	36	36	36
	pendidikan_S1	36	36	36	36

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	pendidikan_S1, pendidikan_D3	.	Enter

a. Tolerance = ,000 limits reached.

b. Dependent Variable: kepatuhan

Model Summary^a

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	,546 ^a	,298	,255	,829	,298	7,005	2	33	,003	1,604

a. Predictors: (Constant), pendidikan_S1, pendidikan_D3

b. Dependent Variable: kepatuhan

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	9,628	2	4,814	7,005	,003 ^a
	Residual	22,678	33	,687		
	Total	32,306	35			

a. Predictors: (Constant), pendidikan_S1, pendidikan_D3

b. Dependent Variable: kepatuhan

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	13,533	,214		63,228	,000					
	pendidikan_D3	,800	,524	,233	1,526	,137	,062	,257	,223	,909	1,100
	pendidikan_S1	1,078	,290	,569	3,719	,001	,498	,543	,542	,909	1,100

a. Dependent Variable: kepatuhan

Excluded Variables^a

Model		Beta In	t	Sig.	Partial Correlation	Collinearity Statistics		
						Tolerance	VIF	Minimum Tolerance
1	pendidikan_sma	, ^a				,000		,000

a. Predictors in the Model: (Constant), pendidikan_S1, pendidikan_D3

b. Dependent Variable: kepatuhan

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions		
				(Constant)	pendidikan_D3	pendidikan_S1
1	1	1,764	1,000	,12	,03	,11
	2	1,000	1,328	,00	,71	,06
	3	,236	2,732	,88	,25	,82

a. Dependent Variable: kepatuhan

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	13,53	14,61	14,14	,524	36
Std. Predicted Value	-1,155	,900	,000	1,000	36
Standard Error of Predicted Value	,195	,479	,227	,078	36
Adjusted Predicted Value	13,43	14,71	14,14	,532	36
Residual	-1,611	1,467	,000	,805	36
Std. Residual	-1,943	1,769	,000	,971	36
Stud. Residual	-2,000	1,831	,000	1,009	36
Deleted Residual	-1,706	1,571	,000	,871	36
Stud. Deleted Residual	-2,101	1,903	-,011	1,039	36
Mahal. Distance	,972	10,694	1,944	2,682	36
Cook's Distance	,005	,162	,028	,038	36
Centered Leverage Value	,028	,306	,056	,077	36

a. Dependent Variable: kepatuhan

Pekerjaan

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
kepatuhan	14,14	,961	36
pekerjaan	,67	,478	36

Correlations

	kepatuhan	pekerjaan
Pearson Correlation	kepatuhan 1,000	pekerjaan ,415
Sig. (1-tailed)	kepatuhan ,006	pekerjaan ,006
N	kepatuhan 36	pekerjaan 36

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	pekerjaan ^a	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: kepatuhan

Model Summary^a

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	,415 ^a	,172	,148	,887	,172	7,061	1	34	,012	1,436

a. Predictors: (Constant), pekerjaan

b. Dependent Variable: kepatuhan

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5,556	1	5,556	7,061	,012 ^a
	Residual	26,750	34	,787		
	Total	32,306	35			

a. Predictors: (Constant), pekerjaan

b. Dependent Variable: kepatuhan

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	13,583	,256		53,049	,000					
	pekerjaan	,833	,314	,415	2,657	,012	,415	,415	,415	1,000	1,000

a. Dependent Variable: kepatuhan

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions	
				(Constant)	pekerjaan
1	1	1,816	1,000	,09	,09
	2	,184	3,146	,91	,91

a. Dependent Variable: kepatuhan

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	13,58	14,42	14,14	,398	36
Std. Predicted Value	-1,394	,697	,000	1,000	36
Standard Error of Predicted Value	,181	,256	,206	,036	36
Adjusted Predicted Value	13,45	14,52	14,14	,402	36
Residual	-2,417	1,417	,000	,874	36
Std. Residual	-2,725	1,597	,000	,986	36
Stud. Residual	-2,783	1,668	,000	1,014	36
Deleted Residual	-2,522	1,545	,000	,926	36
Stud. Deleted Residual	-3,120	1,715	-,018	1,055	36
Mahal. Distance	,486	1,944	,972	,697	36
Cook's Distance	,005	,168	,030	,046	36
Centered Leverage Value	,014	,056	,028	,020	36

a. Dependent Variable: kepatuhan

Penghasilan

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
kepatuhan	14,14	,961	36
penghasilan_ <500jt	,72	,454	36
penghasilan_ 500jt-1M	,22	,422	36

Correlations

		kepatuhan	penghasilan_ <500jt	penghasilan_ 500jt-1M
Pearson Correlation	kepatuhan	1,000	,156	-,290
	penghasilan_ <500jt	,156	1,000	-,862
	penghasilan_ 500jt-1M	-,290	-,862	1,000
Sig. (1-tailed)	kepatuhan	.	,181	,043
	penghasilan_ <500jt	,181	.	,000
	penghasilan_ 500jt-1M	,043	,000	.
N	kepatuhan	36	36	36
	penghasilan_ <500jt	36	36	36
	penghasilan_ 500jt-1M	36	36	36

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	penghasilan_500jt-1M, penghasilan_<500jt ^a		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: kepatuhan

Model Summary^a

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	,344 ^a	,118	,065	,929	,118	2,210	2	33	,126	1,596

a. Predictors: (Constant), penghasilan_500jt-1M, penghasilan_<500jt

b. Dependent Variable: kepatuhan

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3,815	2	1,908	2,210	,126 ^a
	Residual	28,490	33	,863		
	Total	32,306	35			

a. Predictors: (Constant), penghasilan_500jt-1M, penghasilan_<500jt

b. Dependent Variable: kepatuhan

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	15,000	,857		22,830	,000					
	penghasilan_<500jt	-,769	,682	-,364	-1,128	,267	,156	-,193	-,184	,257	3,889
	penghasilan_500jt-1M	-1,375	,735	-,603	-1,872	,070	-,290	-,310	-,308	,257	3,889

a. Dependent Variable: kepatuhan

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions		
				(Constant)	penghasilan_<500jt	penghasilan_500jt-1M
1	1	1,972	1,000	,01	,01	,01
	2	1,000	1,404	,00	,02	,15
	3	,028	8,366	,99	,97	,84

a. Dependent Variable: kepatuhan

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	13,63	15,00	14,14	,330	36
Std. Predicted Value	-1,556	2,608	,000	1,000	36
Standard Error of Predicted Value	,182	,657	,241	,119	36
Adjusted Predicted Value	13,43	14,32	14,09	,274	34
Residual	-2,231	1,375	,000	,902	36
Std. Residual	-2,401	1,480	,000	,971	36
Stud. Residual	-2,448	1,582	,000	1,037	34
Deleted Residual	-2,320	1,571	,000	1,000	34
Stud. Deleted Residual	-2,665	1,621	-,011	1,066	34
Mahal. Distance	,374	16,528	1,944	3,804	36
Cook's Distance	,001	,166	,027	,046	34
Centered Leverage Value	,011	,472	,056	,109	36

a. Dependent Variable: kepatuhan



DAFTAR PUSTAKA

- Abimanyu, Anggito. 2004. *Wajib pajak (Belum) Patuh*. Rubrik Finansial Kompas, 27 Februari.
- Abut, H. (2006). *Perpajakan: Dasar-Dasar Pajak, KUP, PPh 21, PPh WPOP, PPh Badan, Studi Kasus dan Pembahasan Pengisian SPT PPh WPOP, Badan, dan PPN/PPNBM*. Jakarta: Diadit Media.
- Heriyanto, C, Arief. 2006. *Kelas Sosial, Status Sosial, Peranan Sosial dan Hubungannya*. URL:<http://www.edukasi.net>
- Ikhwan, Ali. *Mengapa ditjen Pajak Gagal Perbaiki Citra?* Daily, URL: <http://www.investorindonesia.com/news.html/=1102646113>
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2003
- Mardiasmo (2003). *Perpajakan* (Edisi Revisi). Jakarta: Penerbit Andi.
- Muljono, D. (2007). *Pemotongan Pemungutan PPh dan PPh Pasal 25/29: Lengkap dengan Undang-Undang*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nugroho, Bhuono Agung, SE., Msi., Akt. 2005. *Strategi jitu memilih metode statistik penelitian dengan SPSS*. Yogyakarta: ANDI
- Pandiangan, L. (2002). *Pemahaman Praktis: Undang-Undang Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Pardiat (2008). *Pemeriksaan Pajak: Dasar Hukum Pemeriksaan, Prosedur Pemeriksaan, Prosedur Restitusi Pajak, Pemeriksaan PPN dan PPh, Keberatan, Banding, Upaya Hukum Lainnya* (Edisi 2). Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Resmi, Siti. (2008). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- Rosita, Okta Rosita. (2006) *Hubungan Pekerjaan dan Penghasilan dengan Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Rustam. 2008. *Pendapatan Menurut Standar Akuntansi Keuangan No.23*. URL:<http://Library.USU.ac.id>

- Setiawan, A. (2008). *Cara Mudah Menghitung PPh Badan dengan Undang-Undang Pajak: Aturan Pajak Terbaru*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Siagian, Dergibson dan Sugiarto. 2006. *Metode Statistika untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Penerbit PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Soekanto, Serojono. 2006. *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*. Rajawali Press, Jakarta, t.th. 227
- Taufan, Sofyan Marcus 2005. *Hubungan Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktora Jendral Pajak*. Tangerang : STAN
- Tri komalasari, Puput. 2005. *Degree of Tax Payer Compliance and Tax Tarif The Testing on The Impact of Income Types*. SNA VIII. Solo, 15-16 Sept.
- Uppal, J.S 2005. *Kasus Penghindaran Pajak di Indonesia*. Economic Review Journal, 201.
- Waluyo, dan Wirawan B ilyas. 2007, *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat
- Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2000, Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.